



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MELISA SARI MUTIARA
NPM 1725100236

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

PENGESAHAN SKRIPSI

N A M A : Melisa Sari Mutiara
NPM : 1725100236
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si.)

DEKAN



(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

PEMBIMBING I

(Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.)

PEMBIMBING II

(Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

N A M A : Melisa Sari Mutiara
NPM : 1725100236
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN

MEDAN, DESEMBER 2021

KETUA

(Pipit Buana Sari, S.E., M.M.)

ANGGOTA I


(Dr. Rahima br. Purba, S.E., M.Si., Ak., CA.)

ANGGOTA II

(Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si.)

ANGGOTA III

(Vina Arnita, S.E., M.Si.)

ANGGOTA IV

(Ayu Kurnia Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melisa Sari Mutiara
NPM : 1725100236
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS I KHUSUS TPI MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan,

Desember 2021



Melisa Sari Mutiara
NPM: 1725100236



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1102/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : MELISA SARI MUTIARA
N.P.M. : 1725100236
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 13 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB



Phasli Muhammad Ritonga, B.A., MSc

No Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Jan 2019



Report file name: originality report 29.11.2021 10-2-22 - MELISA SARI MUTIARA_1725100236_AKUNTANSI.docx.html
Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector\reports\originality report 29.11.2021 10-2-22 - MELISA SARI MUTIARA_1725100236_AKUNTANSI.docx.html

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/29/2021 10:02:17 AM

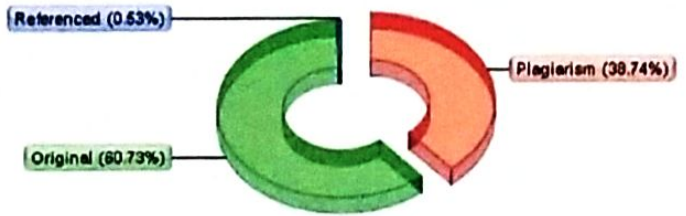
Analyzed document: MELISA SARI MUTIARA_1725100236_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite
Detected language: Id
Check type: Internet Check
[tee_and_enc_string]: [tee_and_enc_value]

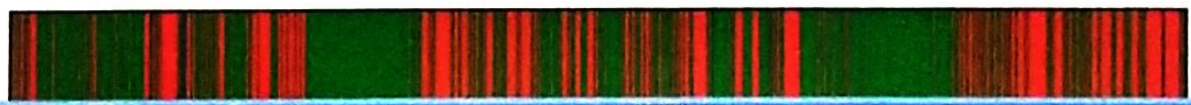


Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDIJL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIAWebsite : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : MELISA SARI MUTIARA
NPM : 1725100236
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
17 April 2021	ACC Sempro	Disetujui	
22 Oktober 2021	ACC Sidang	Disetujui	
21 Februari 2022	ACC Jilid Lux	Disetujui	

Medan, 23 Februari 2022
Dosen Pembimbing,

Dr Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MELISA SARI MUTIARA
NPM : 1725100236
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
14 Juli 2021	ACC untuk Seminar Proposal	Disetujui	
06 November 2021	ACC untuk Ujian Sidang Meja Hijau	Disetujui	
23 Februari 2022	ACC Pengesahan/ Jilid	Disetujui	

Medan, 23 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si

Acc jilid 147
21/2-2022



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MELISA SARI MUTIARA

NPM 1725100236

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**

ACC Pengesahan/ Jilid
Dosen Pembimbing - II
23 Februari 2022



Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MELISA SARI MUTIARA

NPM 1725100236

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MELISA SARI MUTIARA
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 22 Mei 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100236
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3.43
Nomor Hp : 085297385256
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 13 April 2021

Pemohon,

(Melisa Sari Mutiara)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Onhy Medatine, SH., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr Rahima D. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi

(Dr Rahima D. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MELISA SARI MUTIARA
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 22 Mei1994
Nama Orang Tua : RINSON SAGALA SH
N. P. M : 1725100236
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 085297385256
Alamat : JL. DWI WARNA NO. 3 MEDAN

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MELISA SARI MUTIARA
1725100236

Catatan :

- 1.Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2.Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
 Dosen Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22/3/21	Rumusan Masalah ditambah. Tujuan Penelitian ditambah. Garis di Kerangka ditambah.	<i>SH</i>	
27/3/21	Teori. Metodel	<i>SH</i>	
15/4/21	ACC Sempro	<i>SH</i>	

Medan, April 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
 Dosen Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05/06/2021	- Sesuaikan format penulisan dengan panduan skripsi prodi Akuntansi UNPAB.. - Perbaiki Hipotesis Penelitian. - Lengkapi penjelasan kerangka konsep - sampel dicek kembali.		
07/06/2021	- Populasi dicek kembali - Cek kembali Daftar Pustaka, pastikan seluruh kutipan sudah masuk.		
19/06/2021	- ACC untuk Seminar Proposal		

Medan, April 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MELISA SARI MUTIARA
N. P. M : 1725100236
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 22 Mei1994
Alamat : JL. DWI WARNA NO. 3 MEDAN
No. HP : 085297385256
Nama Orang Tua : RINSON SAGALA SH/MESDIANA BEATA SONTA SINURAT
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 25 Februari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Arc Sidang
22/10-2021



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MELISA SARI MUTIARA

NPM 1725100236

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



Ace Sdary Mejadli Jom
03/11-2021
DPT
DAD NASTION S.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MELISA SARI MUTIARA
NPM 1725100236

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N
2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
 Dosen Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Nama Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
22/3/21	Rumusan Masalah ditambah. Tujuan Penelitian ditambah. Garis di Kerangka ditambah.	<i>SH</i>	
27/3/21	Teori. Metapel	<i>SH</i>	
15/4/21	ACC Sempro	<i>SH</i>	

Medan, April 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA
Dosen Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
Nama Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100236
Jenjang Pendidikan :
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kan Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
05/06/2021	- Sesuaikan format penulisan dengan panduan skripsi prodi Akuntansi UNPAB.. - Perbaiki Hipotesis Penelitian. - Lengkapi penjelasan kerangka konsep - Sampel dicek kembali.		
07/06/2021	- Populasi dicek kembali - Cek kembali Daftar Pustaka, pastikan seluruh kutipan sudah masuk.		
19/06/2021	- ACC untuk Seminar Proposal		

Medan, April 2021

Diketahui/Ditetujui oleh :



Dr. Onny Mediana, SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email. unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dr. Rahima br Purba, SE., M.Si., Ak.,CA.
 Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Bidang Pendidikan : Strata - 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9-2021	Perbaikan materi proposal	<i>[Signature]</i>	
10-2021	Hasil penelitian dipisah dgen pembahasan - pembahasan teoritik dgen teori	<i>[Signature]</i>	
10-2021	Acc Sidag	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Medan, Oktober 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Dede S. S. S. SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Dr Rahima br Purba, SE.,M Si., Ak.,CA
 Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Pendidikan : Strata - 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
-2021	- Perbaiki format penulisan yg digunakan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi prodi Akuntansi UNPAB		
-2021	- Fenomena di perkuat, bisa diperkaya tambahan dengan wawancara pendalaman. - Teori penelitian di perkuat		
-2021	- pahami kembali grand theory yg digunakan pada penelitian. - Rumus regresi linear berganda Perbaiki!		

Medan, Oktober 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :





Dr. Dary Medaline, SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 : **SOSIAL SAINS**
 Pembimbing I : Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
 Pembimbing II : Dito Aditia Darma Nst, SE., M.Si
 Mahasiswa : Melisa Sari Mutiara
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Pendidikan : Strata - 1
 Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	<p>- Pastikan kembali seluruh rujukan, kutipan selanjutnya sudah ada pada Daftar pustaka, gunakan aplikasi Mendeley</p> <p>- Ace Sidang Maja Hijau</p>	 	

Medan, Oktober 2021
 Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Qona' Medline, SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MELISA SARI MUTIARA
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 22 Mei 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1725100236
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 138 SKS, IPK 3.43
 Nomor Hp : 085297385256
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



(Cahyo Pramono, S.P., M.M.)

Medan, 13 April 2021

Pemohon,



(Melisa Sari Mutiara)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Orlhy Medaline, SH., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Kep. Prodi Akuntansi

(Dr. Rahima D. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Dr. Rahima D. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II :

(Dito Aditia Darma Nat., SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melisa Sari Mutiara
NPM : 1725100236
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I
KHUSUS TPI MEDAN

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya tidak akan lagi menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah di masa mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Februari 2022



Melisa Sari Mutiara
1725100236

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa pada Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Kuantitatif, dengan pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran angket atau kuisisioner kepada seluruh pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan software komputer IBM SPSS 21. Pengujian hipotesis menggunakan metode statistik, yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Oleh karena itu, pimpinan instansi harus mempertimbangkan Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dalam menentukan pengambilan keputusan dan kebijakan terkait kualitas laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Kata kunci: **Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia**

Abstract

The purpose of this study was to analyze the Internal Control System, Implementation of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Quality of Human Resources on the quality of financial reports in Class I of the Memgration Committee. This research is included in the quantitative research, with the data collection is done through the distribution of questionnaires or questionnaires to all employees at the Immigration Office Class I Special TPI Medan using purposive sampling method. The data that has been collected is then processed using IBM SPSS 21 computer software. Hypothesis testing uses statistical methods, namely multiple linear regression analysis. Based on the results of hypothesis testing, it shows that the Internal Control System, Implementation of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Quality of Human Resources have a positive and significant impact on the quality of Class I Financial Report I and Class I Report I. Therefore, agency leaders must consider the Control System Internal, Implementation of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Quality of Human Resources in determining decision making and si.

Keywords: Quality of Financial Report, Internal Control System, Implementation of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Quality of Human Resources

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan kasih karunia-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi serta seluruh staf Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teristimewa buat orangtua tercinta dan terkasih, Rinson Sagala, S.H. dan Mesdiana Beata Sonta Sinurat, Kakak dan Abang saudara sekandung, Jenny Irene Pratiwi Sagala, S.E./Suami dan Bona Pasius Natanael Sagala, A. Md., beserta seluruh keluarga atas segala doa dan semangat serta dukungan moral maupun materiil yang selalu diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan ini guna memperoleh gelar Sarjana.
8. Terkhusus buat kekasih hati yang tercinta dan terkasih, peneliti ucapkan terima kasih kepada Dr.(c) Immanuel Simanjuntak, S.H., M.H., yang selalu memberikan semangat dan mendampingi dengan penuh kesabaran, perhatian, dan pengorbanan selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian pendidikan ini.
9. Pimpinan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Bapak dan Ibu Pejabat Struktural beserta seluruh pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang telah memberikan izin penelitian, bantuan serta kontribusi selama peneliti melaksanakan penelitian sampai dengan selesai di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan skripsi, Febrina dan Silvana yang telah sama-sama berjuang dan saling mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Dan kepada seluruh teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

Medan, Desember 2021



Melisa Sari Mutiara
NPM: 1725100236

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	9
1.2.1 Identifikasi Masalah	9
1.2.2 Batasan Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.1.2 Laporan keuangan	18
2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan	18
2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan	20
2.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan	22
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	25
2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	28
2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	36
2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia	37
2.2 Penelitian Sebelumnya	39
2.3 Kerangka Konseptual.....	43
2.4 Hipotesis.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Pendekatan Penelitian	50
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	54
3.5 Teknik Pengumpulan Data	62
3.6 Teknik Analisa Data	62

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1	Hasil Penelitian.....	71
4.1.1	Sejarah dan Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	71
4.1.2	Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	75
4.1.3	Struktur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus	75
4.1.4	Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor..... Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	77
4.1.5	Gambaran Umum Responden Penelitian.....	82
4.1.6	Analisis Statistik Deskriptif	86
4.1.7	Uji Data Penelitian	95
4.1.8	Uji Asumsi Klasik	98
4.1.9	Pengujian Hipotesis	104
4.1.10	Analisis Regresi Linier Berganda.....	108
4.2	Pembahasan	111
4.2.1	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	111
4.2.2	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	112
4.2.3	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	113
4.2.4	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	114
4.2.5	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	116
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	117
5.1	Simpulan	117
5.2	Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	120

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2019..... 5
Tabel 1.2	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019.... 6
Tabel 2.1	Mapping Penelitian Sebelumnya 40
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian..... 51
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel 58
Tabel 4.1	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan 78
Tabel 4.2	Rincian Pengembalian Angket/Kuesioner..... 81
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 82
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 83
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan 84
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 85
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi dan Persentase (%) berdasarkan Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan..... 85
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas..... 93
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas 95
Tabel 4.10	Uji Normalitas..... 97
Tabel 4.11	Uji Multikolinearitas 99
Tabel 4.12	Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 101
Tabel 4.13	Hasil Uji Pengaruh Simultan dengan Uji Statistik F..... 102
Tabel 4.14	Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)..... 103
Tabel 4.15	Hasil Koefisien Determinasi (R ²)..... 106
Tabel 4.16	Analisis Regresi Linear Berganda..... 107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	48
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	75
Gambar 4.2 Uji Normalitas Normal Probability Plot.....	99
Gambar 4.3 Uji Normalitas Histogram	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas lembaga publik di pusat dan daerah. Sejauh ini terkait dengan entitas pemerintah, akuntabilitas publik harus memberikan informasi dan pengungkapan tentang bagaimana kegiatan pemerintah dan kinerja keuangan kepada pihak yang berkepentingan dalam pelaporan.

Mengenai kualitas laporan keuangan entitas pemerintah juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, untuk itu yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yaitu dalam menggunakan standar akuntansi pemerintahan (SAP), penggunaan sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan entitas sehingga didapatkan kualitas laporan keuangan yang handal dan relevan, serta diperlukannya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten di bidang akuntansi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Mardiasmo (2006) menerangkan bahwa proses akuntansi atau sistem keuangan saat ini sedang berkembang dengan perkembangan sistem keuangan modern. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama yang dapat

meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan bagian dari kegiatan pengendalian internal, dan fungsinya adalah melakukan penilaian independen terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan fungsi instansi pemerintah (Djalil, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan keseluruhan proses tindakan dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta terhadap kehandalan keuangan, aset milik negara dan mematuhi hukum dan peraturan. Apabila Sistem Pengendalian Internal sudah diterapkan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki nilai informasi yang baik, begitu pula sebaliknya.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah pemahaman terhadap peraturan. Peraturan yang dimaksud disini adalah aturan yang harus dilaksanakan dan prosedur yang terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini pemerintah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2005 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 SAP 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Sistem Akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi, dan transaksi serta peristiwa lain yang diakui pada saat terjadinya. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga memberikan informasi tentang operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan peraturan dalam akuntansi pemerintahan dari sistem kas ke sistem akrual sangat

rumit sehingga diperlukan pemahaman yang lengkap tentang konsep akuntansi. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat memberikan informasi tentang operasional pemerintah, evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan. Diyakini juga bahwa akuntansi akrual dapat memberikan pengukuran yang lebih baik dan konfirmasi yang tepat waktu serta pengungkapan terhadap kewajiban pada masa depan, sehingga dapat mengurangi peluang untuk terjadinya fraud terkait pengukuran kinerja dan mendukung sektor publik dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas

Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah pemanfaatan terhadap teknologi informasi. Pemanfaatan terhadap teknologi informasi menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi bagi organisasi agar dapat tangguh dan mampu untuk menghasilkan laporan yang unggul yang dapat kompetitif dalam persaingan yang semakin ketat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, lembaga pemerintah harus mulai meninggalkan sistem yang manual dan beralih ke sistem komputer. Namun kendala di dalam penerapan teknologi informasi terutama saat ini terkait dengan hardware dan software yang digunakan, update data, kualitas sumber daya manusia yang ada serta adanya keterbatasan dana. Hambatan ini mungkin menjadi faktor yang menghambat dalam penggunaan teknologi informasi yang tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia juga memegang peranan yang penting dalam setiap organisasi termasuk organisasi pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan sistem akuntansi yang akuntabel, dan melaksanakan pelaporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan sumber daya

manusia yang handal dan kompeten untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia untuk memahami dan menggunakan logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan di dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidaksesuaian antara laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2020, mengungkapkan masih terdapat 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp 8,97 triliun, meliputi sebanyak 6.713 (50%) terdapat permasalahan dalam kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan sebanyak 6.702 (49%) terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 8,28 triliun, serta sebanyak 152 (1%) terdapat permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 692,05 miliar.

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui hasil pemeriksaan BPK-RI juga mengungkapkan terdapat 1.094 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 668 permasalahan Rp 4,25 triliun, penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) 426 permasalahan, meliputi: (1) Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 472 permasalahan sebesar Rp 589,54 miliar; (2) Potensi kerugian sebanyak 48 sebesar Rp 1,89 triliun, dan; (3) Kekurangan penerimaan sebanyak 148 permasalahan sebesar Rp 1,77 triliun. Atas permasalahan tersebut,

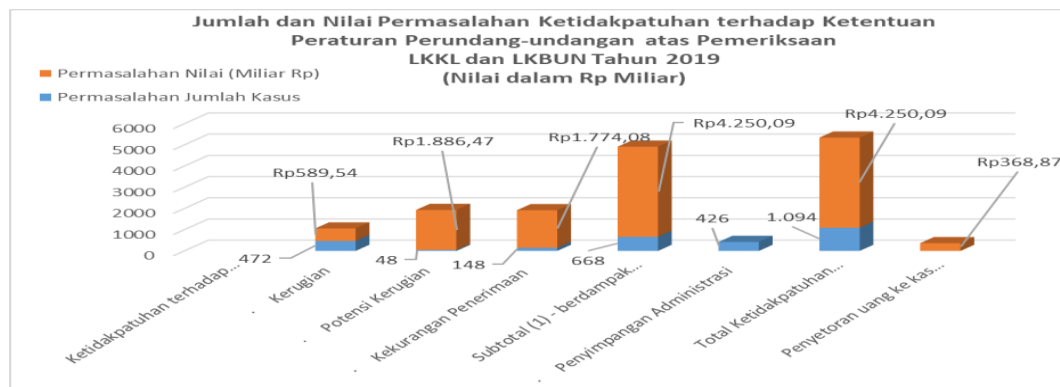
entitas telah melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp 368,87 miliar.

Tabel 1.1 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2019

(Nilai dalam Rp Miliar)

Subkelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan	
	Jumlah Kasus	Nilai (Miliar Rp)
Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:		
• Kerugian	472	589,54
• Potensi Kerugian	48	1.886,47
• Kekurangan Penerimaan	148	1.774,08
Subtotal (1) - berdampak finansial	668	4.250,09
• Penyimpangan Administrasi	426	
Total Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	1.094	4.250,09
Penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset		368,87

(sumber: www.bpk.go.id - IHPS I Tahun 2020)



Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui juga hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada 7 objek pemeriksaan pemerintah pusat, secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 40 temuan yang memuat 79 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi: (1) Sebanyak 51 kelemahan sistem pengendalian intern; (2) Sebanyak 23 ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 61,38 miliar, dan; (3) Sebanyak 5 permasalahan ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar Rp 22,99 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 5,41 miliar.

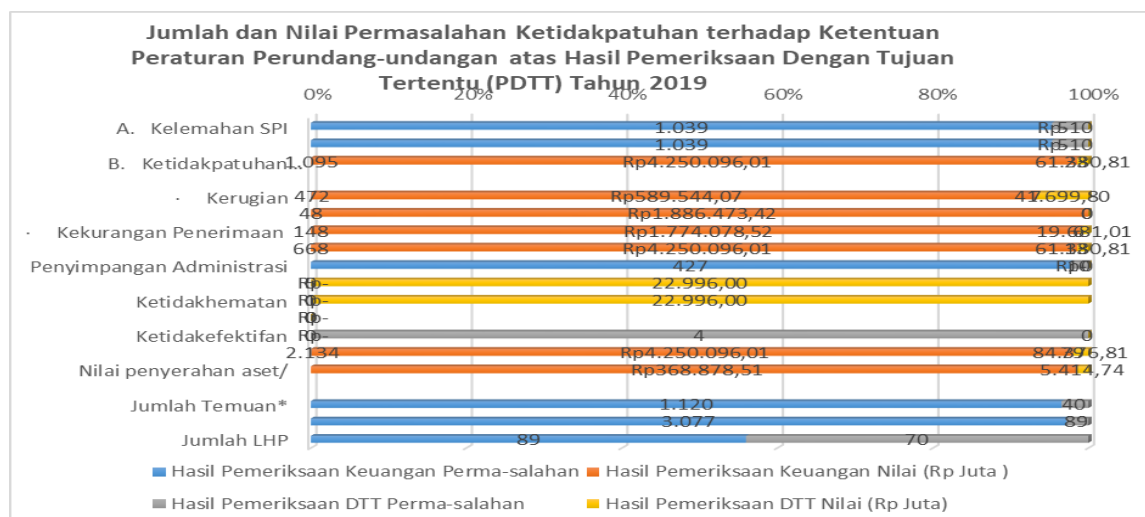
Tabel 1.2 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2019

(Nilai dalam Rp Juta)

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
A. Kelemahan SPI	1.039	-	51	-	1.090	
Kelemahan SPI	1.039	-	51	-	1.090	
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.095	4.250.096,01	23	61.380,81	1.118	4.311.476,82
Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:						
• Kerugian	472	589.544,07	7	41.699,80	479	631.243,87
• Potensi Kerugian	48	1.886.473,42	-	-	48	1.886.473,42
• Kekurangan Penerimaan	148	1.774.078,52	6	19.681,01	154	1.793.759,53
Subtotal berdampak finansial	668	4.250.096,01	13	61.380,81	681	4.311.476,82
Penyimpangan Administrasi	427	-	10	-	437	-
C. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	5	22.996,00	5	22.996,00
Ketidakhematan	-	-	1	22.996,00	1	22.996,00
Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
Ketidakefektifan	-	-	4	-	4	-
TOTAL (A+B+C)	2.134	4.250.096,01	79	84.376,81	2.213	4.334.472,82
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara		368.878,51		5.414,74		374.293,25
Jumlah Temuan*		1.120		40		1.160
Jumlah Rekomendasi*		3.077		89		3.166
Jumlah LHP		89		70		96

Keterangan: *) Tidak termasuk temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan atas LKPP

(sumber: www.bpk.go.id - IHPS I Tahun 2020)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai salah satu Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan

hukum dan hak asasi manusia, berdasarkan data yang bersumber dari website Kemenkumham bahwa pada tahun 2015-2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan. Namun, dalam IHPS I BPK-RI Tahun 2020, hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pengelolaan belanja pemerintah pusat mengungkapkan terdapat 12 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi: 10 kelemahan sistem pengendalian intern, 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 16,20 miliar, dan 3 permasalahan 3E sebesar Rp 22,99 miliar, dimana salah satunya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat hasil pengadaan pada TA 2019 yang belum dimanfaatkan, di antaranya pengadaan sarana dan prasarana *data center* di pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) dan pengadaan perangkat pendukung layanan unit keimigrasian, yang mengakibatkan indikasi pemborosan sebesar Rp 22,99 miliar. Selain itu, terdapat juga kelebihan pembayaran sebesar Rp 8,36 miliar atas 13 paket pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk mengoptimalkan hasil pengadaan *data center*, memperbaiki mekanisme pemanfaatan dan distribusi barang di lingkungan Ditjen Imigrasi, serta menarik kelebihan pembayaran yang terjadi.

Menurut Sukmaningrum (2012), informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang diberikan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, jika tidak sesuai akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan pendapatan, administrasi yang lemah, inefisiensi dan inefisiensi. Dilihat dari banyaknya pejabat yang terlibat dalam perkara hukum, rendahnya kualitas informasi dalam laporan

keuangan dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan kesalahan di bidang pengelolaan keuangan, dan dapat menimbulkan kerugian terhadap negara. Tata kelola keuangan yang buruk mengarah pada ekonomi biaya yang tinggi tetapi pemberian kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat masih rendah, kerusakan fasilitas umum yang kian semakin cepat, dan biaya terhadap transaksi-transaksi yang tinggi.

Fenomena ini dapat menciptakan jurang antara harapan dan kenyataan, untuk itu diharapkan dengan adanya penguatan terhadap pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi yang memadai, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Semua Instansi Pemerintahan juga diwajibkan untuk dapat memahami dan memenuhi standar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Fakta dan fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai salah satu unit satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan judul penelitian “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan**”. Dengan demikian faktor-faktor yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain : Standar Pengendalian Internal (SPI), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan terhadap Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat dari pada tahapan dalam pelaporan keuangan yang masih adanya dilakukan secara manual yang dapat menimbulkan tidak efisiennya waktu dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat berdampak pada penurunan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam penyajian laporan keuangan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pemahaman teknologi, adanya perbedaan dalam realisasi anggaran instansi terhadap regulasi atau peraturan yang berlaku.
3. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun 2020, hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terdapat beberapa temuan-temuan hasil pemeriksaan pada Tahun Anggaran 2019 pada Direktorat Jenderal Imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham-RI).

1.2.2 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis untuk melakukan penelitian dan untuk tetap menghindari terjadinya persepsi, maka penelitian ini dibatasi pada analisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan hasil dari wawancara pendahuluan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian, yang mana digunakan untuk menguatkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ?
4. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ?
5. Apakah sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi pemerintah terkhususnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan agar kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan semakin lebih baik lagi. Diharapkan semua target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik, salah satunya adalah dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan menjadi bahan referensi untuk dikaji lebih lanjut bagi penelitian yang khususnya berkaitan dengan sektor pemerintahan.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan” yang mana memiliki perbedaan dengan judul penelitian, yaitu: “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)”, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.

2. Variabel Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan 4 (empat) variabel bebas (independent variabel) dalam penelitiannya, yang terdiri dari: Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, SPIP, dan Komitmen Organisasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas (independent variabel), yang terdiri dari Sistem Pengendalian Internal (SPI), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Jumlah Observasi/Sampel (n)

Pada penelitian terdahulu memiliki sampel populasi sebanyak 127 responden dari 38 instansi sebagai responden sedangkan pada penelitian ini memiliki sampel populasi pegawai sebanyak 245 orang pegawai dari 1 instansi sebagai responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman, sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

5. Model Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan model Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda, sedangkan pada penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Istilah *agency* berasal dari penerapan pendelegasian dalam pengambilan keputusan pemberi amanah (*principal*) kepada agen (pemegang amanah). Pada teori keagenan (*agency theory*) ini, akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto et al, 2007 dalam Rosalin, 2011).

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang mendasari di dalam penelitian ini. Di dalam Teori keagenan (*agency theory*), dibahas tentang keterkaitan hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Hubungan keagenan adalah hubungan kontraktual di mana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk memberikan layanan atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen, dalam hal ini yaitu pengambil keputusan, sedangkan yang disebut dengan agen adalah pihak yang melaksanakan wewenang dari prinsipal, yaitu manajemen yang mengelola organisasi.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa pengertian dari akuntabilitas publik merupakan sebagai kewajiban pemegang wewenang (agen) harus dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan wewenang (prinsipal) yang mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan wewenang tersebut. Terdapat 2 (dua) jenis akuntabilitas publik, yang terdiri dari: 1) akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana (wewenang) kepada otoritas yang lebih tinggi; dan 2) akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Berkaitan dengan pelaporan keuangan, pemerintah yang disebut sebagai agen, berkewajiban untuk memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat kepada para pengguna informasi keuangan, pemerintah yang disebut sebagai prinsipal, secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap akuntabilitas serta dapat mengambil keputusan melalui kegiatan ekonomi, sosial dan politik. Di dalam pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. (Rosalin, 2011)

Keterkaitan teori keagenan dan teori kualitas laporan keuangan terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi dari suatu instansi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu pertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi dapat terpenuhi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tercapai

secara maksimal. Untuk menilai hal tersebut, dapat dilihat dari bagaimana kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu instansi atau organisasi tersebut yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna terutama yang berkaitan dengan proses pengelola keuangannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pemakai informasi dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan organisasi karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. (Munawir, 2014:9). Kualitas Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Munawir, 2014:9). Indikator Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut (Munawir, 2014:9):

1. Relevan

Dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pemakai dengan membantu para pemakai informasi dalam melakukan evaluasi kejadian di masa lalu atau sekarang serta dapat memprediksi masa depan, mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasinya, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan. Oleh

karena itu, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaannya

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penyajian laporan keuangan secara jujur. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan kesalahan material, dan setiap fakta dapat dinyatakan dan diverifikasi dengan jujur. Informasi tersebut mungkin relevan, tetapi jika sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat menyesatkan para pengguna informasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya. Informasi akuntansi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih memberikan manfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode yang sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan yang lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun maka perbandingan secara internal dapat dilakukan. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan jika suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika suatu entitas pemerintah dapat menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan selama periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna informasi, dan dinyatakan dalam istilah serta bentuk yang dirancang khusus untuk para pengguna yang memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa para pengguna informasi memiliki pemahaman yang cukup mengenai aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor dan kemauan para pengguna informasi untuk dapat mempelajari informasi yang relevan.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Bastian (2010:178) definisi dari laporan keuangan (sektor publik) adalah mewakili atas posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh entitas sektor publik. Laporan keuangan adalah suatu catatan akuntansi dari suatu entitas dalam suatu periode akuntansi tertentu yang dapat memberikan gambaran atas kinerja dari suatu entitas. Laporan keuangan juga merupakan laporan terstruktur mengenai kondisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan juga dapat dikatakan sebagai suatu produk yang dihasilkan melalui standar akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten sangat dibutuhkan agar dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan

keuangan, juga dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian dari laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur atas suatu posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Entitas pelapor merupakan suatu unit pemerintah yang terdiri atas satu maupun lebih dari satu entitas akuntansi. Sesuai peraturan perundang-undangan, entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Laporan tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit organisasi internal. Pemerintah pusat / daerah atau organisasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan atas saldo anggaran lebih, laporan perubahan atas ekuitas, neraca, serta catatan atas laporan keuangan. Komponen dari laporan keuangan terdiri atas : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang berkualitas dan akurat menunjukkan bahwa pimpinan suatu entitas baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan harus dapat bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang berwenang dalam pelaksanaan proses organisasi dan manajemen. Laporan keuangan pada awalnya hanya digunakan sebagai alat pengukur kinerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau mengevaluasi posisi keuangan suatu entitas, kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui posisi keuangan dan pencapaian entitas dalam waktu periode tertentu.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

IAI (2009) menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Mahmudi (2011) tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019, tujuan dari laporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, antara lain :

1. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari entitas pelapor yang kemudian informasi ini digunakan oleh para

pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya.

2. Secara khusus, tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan dan untuk membuktikan tanggung jawab entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk tujuan akuntabilitas, penyajian informasi dilakukan dengan : (a) Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan hak dan kepentingan pemerintah; (b) Memberikan informasi tentang perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan status ekuitas pemerintah; (c) Memberikan informasi tentang sumber, pengalokasian dan bagaimana penggunaan sumber daya ekonomi; (d) Memberikan informasi tentang kepatuhan anggaran; (e) Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (f) Memberikan informasi tentang potensi pengelolaan kegiatan pemerintah yang didanai pemerintah; dan (g) Memberikan informasi yang membantu menilai kemampuan entitas pelapor untuk mengumpulkan dana untuk aktivitasnya.

Laporan keuangan sektor publik merupakan alat untuk dapat mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap manajemen dan juga penilaian terhadap kinerja organisasi. Dari perspektif eksternal, pelaporan keuangan merupakan alat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan. (Mardiasmo, 2009: 175)

2.1.2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai kualitas laporan keuangan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun 4 (empat) karakteristik kualitatif dari laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu sebagai berikut :

1. Relevan

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pemakai dengan membantu para pemakai informasi dalam melakukan evaluasi kejadian di masa lalu atau sekarang serta dapat memprediksi masa depan, mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasinya, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan. Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaannya. Karakteristik dari informasi yang relevan antara lain:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi bahwa alat tersebut mengoreksi ekspektasi masa lalu mereka.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi akuntansi keuangan yang disajikan dapat membantu para pemakai informasi

- dalam memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa terkini.
- c. Tepat waktu, informasi akuntansi keuangan akan ditampilkan secara tepat waktu sehingga dapat memberikan pengaruh dan digunakan dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, dalam penyajian informasi akuntansi keuangan pemerintah sedapat mungkin disajikan secara lengkap, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang mendasari setiap informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara jelas untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pemahaman yang menyesatkan dan kesalahan material, dan setiap fakta dapat dinyatakan dan diverifikasi dengan jujur. Informasi tersebut mungkin relevan, tetapi jika sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka dapat menyesatkan para pengguna informasi. Karakteristik dari informasi yang andal antara lain :

- a. Penyajian Jujur, informasi akuntansi keuangan digambarkan dengan jujur seluruh transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*Verifiable*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dilakukan pengujian, dan jika pengujian yang

dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya akan tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas, informasi diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada kebutuhan pihak-pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi akuntansi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih memberikan manfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode yang sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan yang lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun maka perbandingan secara internal dapat dilakukan. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan jika suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika suatu entitas pemerintah dapat menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan selama periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna informasi, dan dinyatakan dalam istilah serta bentuk yang dirancang khusus untuk para pengguna yang memahami informasi tersebut. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa para pengguna informasi memiliki pemahaman yang cukup mengenai aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor dan kemauan para pengguna informasi untuk dapat mempelajari informasi yang relevan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut COSO (*Commite Of Sponsoring Organizations of Treadway Commision, 1992*), pengendalian internal adalah suatu kerangka internal control dengan mengintegrasikan seluruh aspek operasi dan keuangan perusahaan, termasuk antara pimpinan (*top executives*) maupun terhadap para pegawai (*employees*), tujuan dan resiko usaha, serta meliputi keseluruhan unit kegiatan organisasi. Penerapan pengendalian internal menurut COSO (*Commite Of Sponsoring Organizations of Treadway Commision, 1992*), diharapkan mampu mengurangi berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin bisa terjadi, perbaikan terhadap kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Definisi pengendalian internal yang dirumuskan oleh COSO juga diadopsi oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Menurut COSO, tujuan utama dari pengendalian internal antara lain:

- a. *Effectiveness and efficiency of operations*, berkaitan dengan penekanan terhadap tujuan dasar dari setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber daya;
- b. *Reliability of financial reporting*, berkaitan dengan kehandalan laporan organisasi;
- c. *Compliance with applicable laws and regulations*, berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana organisasi itu berada.

Menurut Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu kegiatan pengendalian internal terutama atas pengelolaan

sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian internal atas pengelolaan informasi antara lain :

- a. Pengendalian umum, mencakup pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan;
- b. Pengendalian aplikasi, mencakup pengendalian atas otorisasi, pengendalian atas kelengkapan, pengendalian atas akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan data dan file data.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya : (a) Efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah; (b) Keandalan Laporan Keuangan; (c) Pengamanan terhadap aset negara; dan (d) Ketaatan terhadap peraturan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan para personel mengenai pengendalian, yang meliputi: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang efektif dan efisien terhadap pembinaan sumber daya manusia (SDM), perwujudan para peran aparat terhadap pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian resiko

Penilaian resiko merupakan mekanisme untuk mengelola berbagai resiko dalam organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai, terdiri dari: identifikasi resiko, dan analisis resiko.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan terhadap kegiatan organisasi dilakukan secara efektif dan efisien di dalam proses mencapai tujuan organisasi, yang terdiri dari: review atas kinerja instansi terkait, pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM), pengendalian terhadap

pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik terhadap aset negara, pemisahan fungsi-fungsi, pencatatan yang akurat dan secara tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta seluruh transaksi dan kejadian penting, dan pembatasan terhadap akses atas sumber daya dan pencatatannya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang telah ditentukan. Informasi disajikan dalam bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu sehingga menjadi komunikasi yang efektif yang memungkinkan pimpinan instansi dapat melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya secara maksimal.

5. Pemantauan

Proses pemantauan terhadap kualitas kinerja dari struktur pengendalian internal dilakukan sepanjang waktu untuk memastikan bahwa rekomendasi dari hasil audit dan reviu lainnya agar dapat segera ditindak lanjuti.

2.1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa pemahaman merupakan sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa pengertian dari peraturan adalah ketentuan yang mengikat masyarakat, yang kemudian dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian terhadap tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima oleh setiap kelompok masyarakat dan harus menaati aturan yang

berlaku, atau ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Menurut Kiranayanti (2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan adalah pemahaman anggota atau pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan.

Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa standar akuntansi adalah pedoman-pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Peraturan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal mendefinisikan standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP.

Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal yang dinyatakan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Standar Akuntansi Pemerintahan dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menuju Akruwal menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Bertujuan untuk mengatur dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum merupakan laporan keuangan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi dari laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akruaI. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur di dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran

Bertujuan untuk menentukan dasar bagi pemerintah dalam merealisasikan laporan realisasi anggaran, sehingga dapat mencapai sasaran akuntabilitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menunjukkan bahwa legislatif

dan eksekutif telah sepakat mengenai tingkat pencapaian target sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan penyajian informasi mengenai realisasi: 1) Pendapatan-LRA, 2) belanja, 3) transfer, 4) surplus/defisit-LRA, 5) dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing dibandingkan dengan anggarannya.

3. PSAP 03 Laporan Arus Kas

Bertujuan sebagai indikator dalam jumlah arus kas di masa depan, serta bermanfaat untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan ini sebagai alat dari pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama dalam periode pelaporan. Apabila ditautkan kepada laporan keuangan lainnya, laporan ini dapat menyajikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ ekuitas dari suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

4. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Bertujuan untuk mengatur dalam hal penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan transparansi terhadap laporan keuangan dan lebih memahami informasi keuangan pemerintah. Laporan keuangan umum adalah laporan yang penyajiannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atas informasi akuntansi keuangan. Pengguna informasi disini mencakup masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, auditor, pihak-pihak yang berperan atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan pemerintah. Laporan keuangan mencakup laporan keuangan tersendiri atau bagian dari laporan keuangan yang tercantum dalam dokumen publik

lainnya (seperti laporan tahunan). Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelapor yang menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan konsolidasian, kecuali Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah. Entitas yang bukan merupakan entitas pelapor dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Jika hal ini diperlukan, meskipun standar tersebut tidak memenuhi peraturan dan / atau standar akuntansi entitas pelapor pemerintah yang relevan, meskipun standar tersebut tidak memenuhi standar atau kriteria dari suatu entitas, maka standar tersebut harus tetap diterapkan oleh entitas tersebut.

5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan

Bertujuan untuk melakukan pengaturan terhadap perlakuan akuntansi atas persediaan yang dianggap perlu untuk dicantumkan di dalam laporan keuangan. Dalam hal tujuan umum dari laporan keuangan, pernyataan standar ini berlaku untuk menyajikan semua persediaan dalam laporan keuangan. Standar ini berlaku untuk semua entitas pemerintah pusat dan daerah, kecuali perusahaan negara/daerah. Pernyataan standar ini juga tidak mengatur dalam hal: a) persediaan bahan baku dan peralatan yang dimiliki oleh proyek swakelola dalam pengerjaannya dicatat pembebanannya dalam akun konstruksi; dan b) Sebagai instrumen keuangan. Persediaan disini mencakup barang atau persediaan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

6. PSAP 06 Akuntansi Investasi

Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk investasi pemerintah dalam semua laporan keuangan yang bertujuan umum yang kemudian disusun dan disajikan

sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pernyataan standar ini berlaku bagi entitas pelapor yang menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan konsolidasi, kecuali perusahaan negara / daerah. Pernyataan standar ini juga mengatur perlakuan akuntansi terhadap investasi pada pemerintah pusat dan daerah yaitu, untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk juga pada saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode evaluasi investasi, serta pengungkapannya di dalam laporan keuangan.

7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap

Bertujuan untuk mengatur metode perlakuan akuntansi atas aset tetap, termasuk pengakuan, penetapan nilai buku, penetapan dan perlakuan akuntansi, revaluasi nilai buku dan penurunan nilai aset tetap (carrying value). Pernyataan standar ini juga berlaku bagi seluruh entitas pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan melakukan pengaturan terhadap perlakuan akuntansi, termasuk saat pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Aset tetap juga merupakan bagian utama dari kekayaan pemerintah, sehingga memiliki nilai yang sangat penting dalam penyajian neraca.

8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan standar ini memberikan pedoman untuk: a) Menentukan pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan; b) Menentukan jumlah biaya yang telah dikapitalisasi dan dicatat dalam neraca; c) Menentukan, mengkonfirmasi dan mengungkapkan biaya konstruksi. Masalah utama dalam akuntansi ini adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap dan harus dilakukan pencatatan sampai penyelesaian konstruksi.

9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban

Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas kewajiban, termasuk saat pengakuan, penentuan nilai buku, amortisasi, dan jumlah biaya pinjaman dari kewajiban tersebut. Pernyataan standar ini berlaku untuk semua entitas pemerintah yang melakukan penyajian atas laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur pengaturan terhadap akuntansinya (termasuk saat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan). Pernyataan standar akuntansi kewajiban ini juga mengatur atas: a) Perlakuan akuntansi hutang pemerintah, termasuk kewajiban dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang yang disebabkan oleh hutang dari dalam negeri dan hutang dari luar negeri; b) Perlakuan akuntansi atas transaksi pinjaman mata uang asing; c) Perlakuan akuntansi atas transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman; d) Perlakuan akuntansi atas biaya yang ditimbulkan oleh hutang pemerintah.

10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk mengoreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak berkelanjutan. Ketika melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, entitas harus menggunakan pernyataan standar Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan ini untuk melakukan pelaporan terhadap dampak kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, dan laporan operasional, serta Catatan atas

laporan keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelapor ketika menyusun laporan keuangan, termasuk laporan keuangan semua entitas akuntansi (termasuk badan layanan umum) di bawah pemerintah pusat/ daerah.

11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Bertujuan untuk mengatur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian pada semua unit pemerintahan dalam rangka penyajian laporan keuangan dalam hal tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan kelengkapan pada laporan keuangan. Dalam standar ini, laporan keuangan bertujuan umum mengacu pada laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna pelaporan (termasuk badan legislatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan). Pernyataan standar ini tidak mencakup pada: a) Laporan keuangan konsolidasi perusahaan negara / daerah; b) Perlakuan akuntansi atas investasi pada entitas asosiasi; c) Akuntansi investasi usaha patungan (*joint ventures*); d) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat /daerah.

12. PSAP 12 Laporan Operasional

Bertujuan untuk menentukan dasar bagi pemerintah dalam menyajikan laporan operasional guna mencapai tujuan akuntabilitas pemerintahan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaporan ini adalah menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelapor dan entitas akuntansi pemerintah pusat maupun daerah, dan tidak termasuk perusahaan negara / daerah ketika melakukan penyusunan atas laporan operasional

yang menjelaskan pendapatan-LO, beban, dan surplus / defisit operasional selama periode pelaporan tertentu. Manfaat informasi dari laporan operasional adalah menyajikan informasi tentang seluruh operasi keuangan entitas pelapor, yang tercermin di dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus / defisit operasional entitas pelapor, yang disajikan secara paralel dengan periode sebelumnya.

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi sebagai media dimanfaatkan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013), teknologi informasi merupakan penggabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer merupakan teknologi yang berkaitan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan seperti printer, scanner, dan sebagainya, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berkaitan dengan komunikasi jarak jauh.

Menurut KBBI (2008) mendefinisikan pengertian pemanfaatan merupakan suatu proses atau cara atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan organisasi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam melakukan proses pengolahan data-data dan informasi keuangan sehingga dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

Ada 4 (empat) manfaat dari penggunaan teknologi informasi menurut Sutarman (2009:19) dalam Devi Saraswati (2019), yaitu sebagai berikut :

- a. Kecepatan (Speed), yaitu komputer dapat mengerjakan suatu perhitungan yang kompleks dalam waktu hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.
- b. Konsistensi (Consistency), yaitu hasil pengolahan yang dilakukan lebih konsisten dan tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.
- c. Ketepatan (Precision), yaitu komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat. Komputer juga dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.
- d. Keandalan (Reliability), yaitu apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi kemungkinan lebih kecil jika menggunakan komputer.

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Sumber daya manusia (*human resources*) adalah kemampuan orang-orang di dalam organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari para eksekutif dan para legislatif untuk menjalankan fungsi dan perannya masing-masing di dalam pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia (SDM) adalah satu kesatuan tenaga kerja di dalam suatu organisasi, bukan hanya jumlah pegawai yang ada. Sebagai satu kesatuan, sumber daya manusia (SDM) juga harus dipandang sebagai suatu sistem di mana setiap pegawai dapat menjalankan

tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia (SDM) juga diukur menurut latar belakang pendidikan pegawai.

Menurut Zuliatri (2012), kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dari seseorang ataupun individu, suatu organisasi (kelembagaan), maupun suatu sistem untuk dapat melakukan fungsi-fungsi atau kewenangannya di dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus dilihat sebagai kemampuan seseorang di dalam mencapai kinerja, dapat menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*incomes*). Untuk itu, pemerintah sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional yang memiliki pengetahuan yang luas, daya saing, dan jiwa kompetitif di bidangnya masing-masing terutama di bidang akuntansi. Sumber daya manusia (SDM) yang profesional juga akan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten di bidang akuntansi (keuangan) menjadi faktor yang utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Hutapea (2008) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen utama di dalam pembentukan kompetensi sumber daya manusia (SDM), yaitu : pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang dikuasainya dan hal ini turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan

tugas yang dibebankan kepadanya, seorang pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan.

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi bagi seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan dalam memahami dan dapat memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah laku seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2005), sumber daya manusia (SDM) yang tidak mempunyai kompetensi atau kapasitas, tidak akan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi dari sumber daya manusia (SDM) tersebut maka penyusunan laporan keuangan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia tersebut harus mempunyai: (a) Kualifikasi pendidikan yang baik; (b) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang dikerjakan; (c) Pengalaman dalam hal yang dikerjakan; (d) Tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Devi Saraswati (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kota Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM 2. Pemanfaatan TI 3. Penerapan SAP 4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 5. Sistem Informasi Keuangan Daerah 	Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Regresi Linier Berganda	Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Ahmad Zubeir Rangkuti (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Implementasi SIMDA sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas data 2. Kompetensi sumber daya manusia 3. Dukungan manajemen 4. Sistem pengendalian internal 5. Faktor eksternal 	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, dukungan manajemen, sistem pengendalian internal, dan faktor eksternal secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan (secara statistik) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal.
3.	Fitrawansah (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
		(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kompetensi sumber daya manusia 3. Sistem pengendalian internal 4. Kemampuan manajemen 			<p>daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemampuan manajemen merupakan variabel moderasi dalam interaksi antara kemampuan manajemen dan sistem akuntansi keuangan daerah dimana interaksi keduanya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
4.	Elvin Andrianto (2017)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas SDM 2. Pemanfaatan TI 3. SPIP 4. Komitmen Organisasi 	Kualitas LKPD	Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Untuk Komitmen Organisasi tidak dapat</p>

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
		Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)				memperkuat pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD.
5.	Zuliarti (2012)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kudus)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas sumber daya manusia 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Pengendalian intern Akuntansi 	Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Regresi Linier Berganda	<p>Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Konseptual

Sugiyono (2014: 128) menyatakan bahwa kerangka konsep secara teoritis akan menghubungkan variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen (*independent variabel*) dan variabel dependen (*dependent variabel*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sedangkan variabel bebas adalah sistem pengendalian intern, penerapan standard akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia.

2.3.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa sistem pengendalian internal adalah proses lengkap dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan terhadap organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta kehandalan atas pelaporan keuangan, pengamanan atas aset milik negara dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Melalui sistem pengendalian internal pemerintah, pimpinan dapat memberikan arahan kepada seluruh pegawai dan mengawasi terjadinya

penyelewengan atau kecurangan (*fraud*) terhadap sumber daya organisasi. Jika sistem pengendalian internal organisasi rendah, memungkinkan terdapat kesalahan di dalam penyajian laporan keuangan organisasi, dan kemungkinan ketidaktepatan atau kecurangannya juga sangat tinggi.

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan organisasi dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian internal dan dapat dilaksanakan melalui: melakukan peningkatan pengawasan, pemisahan tugas pokok dan fungsi yang jelas, pendelegasian otorisasi, kelengkapan dan bukti-bukti yang sah atas pelaksanaan transaksi ataupun kegiatan, melaksanakan pencatatan secara akurat dan tepat waktu, dan menguji kembali sistem pengendalian internal organisasi yang sedang berjalan.

Unsur-unsur tersebut harus diterapkan dengan baik agar tercapai kualitas laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal merupakan pondasi dari tata kelola yang baik dan menjadi tolak ukur terhadap penyajian data dan informasi yang tidak sah dalam penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Devi Saraswati, 2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Seseorang yang mempunyai pemahaman terhadap akuntansi adalah orang yang cakap dan mengerti tentang akuntansi. Paham terhadap akuntansi disini dapat diartikan bahwa seseorang itu dapat mengerti dan mengetahui alur bagaimana

proses akuntansi itu terjadi sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman kepada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Walaupun di dalam organisasi telah tersedia software-software dan aplikasi-aplikasi akuntansi, tetapi karena penguasaan dan pemahaman terhadap akuntansi itu sendiri masih rendah, maka kualitas laporan keuangan yang disajikan juga menjadi tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) menjadi acuan di dalam penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan kemudian diterapkan di dalam lingkup pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Jika standar akuntansi pemerintahan (SAP) telah dapat dipahami dan diterapkan dalam pelaporan keuangan maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Maka dari itu, organisasi harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas untuk memberikan dampak pada tata kelola pemerintahan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Devi Saraswati, 2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu mempercepat pemrosesan data-data transaksi dan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi dimaksudkan agar membantu dalam mempercepat proses pengolahan data-data transaksi keuangan dan kemudian penyajian laporan keuangan dapat dilakukan dengan tepat waktu.

Seorang pegawai yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi akan memiliki tanggung jawab dan kesadaran terhadap tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya, yang ditunjukkan dalam bentuk penyampaian dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan disajikan dengan tepat waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen seseorang maka pemanfaatan teknologi informasi juga semakin tinggi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan organisasi yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Devi Saraswati, 2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (TI) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Sumber daya manusia (*human resources*) adalah kemampuan orang-orang di dalam organisasi yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilaksanakan

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang dapat menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak akan dapat diterapkan dengan baik, tanpa adanya dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas, dalam melaksanakan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

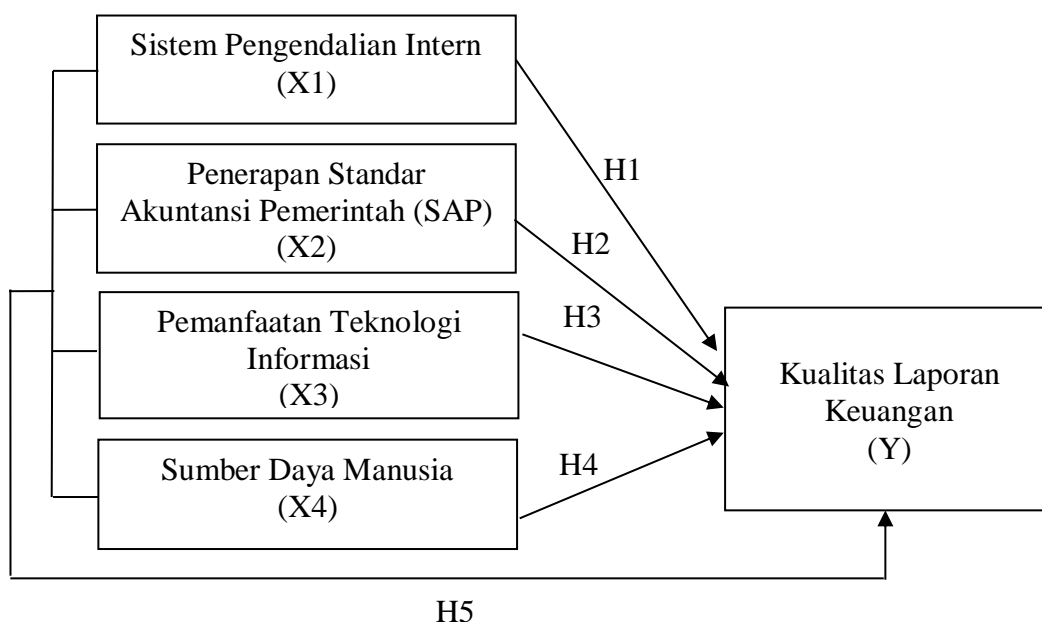
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dan menjadi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sumber daya manusia (SDM) harus dapat paham akan persoalan dalam penyusunan laporan keuangan dan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan (SAP). Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan dapat berdampak pada terjadinya kesalahan dalam memahami dan menerapkan metode, teknik dan standar yang terdapat dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP), sehingga laporan keuangan yang disusun dan disajikan juga akan salah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Devi Saraswati, 2019) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Penelitian dari Ahmad Zubeir Rangkuti (2017) yang meneliti tentang pengaruh kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, dukungan manajemen, sistem pengendalian internal, dan faktor eksternal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh secara signifikan (secara statistik) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun kerangka konseptual di dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2014: 132) mengemukakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hipotesis yang akan diuji peneliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

H4 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

H5 : Sistem Pengendalian Internal (SPI), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antar variabel yang digunakan dan juga untuk menjelaskan pengaruh antara variabel bebas (*independent variabel*), yaitu: kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap variabel terikat (*dependent variabel*), yaitu kualitas laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian korelasional (Correlational Research). Menurut Sugiyono (2017), penelitian korelasional (Correlational Research) merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara 2 (dua) variabel atau lebih. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel-variabel.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di wilayah Sumatera Utara, yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021. Berikut ini adalah rincian waktu proses penelitian:

Tabel 3.1
Skedul Proses Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Maret	April s/d				Agustus s/d				Desember				
		2021	Juli 2021				November 2021				2021				
1.	Riset awal/ Pengajuan Judul	■													
2.	Penyusunan proposal	■	■	■	■	■	■								
3.	Seminar proposal							■							
4.	Perbaikan/Acc Proposal							■	■						
5.	Pengolahan data								■	■					
6.	Penyusunan Skripsi									■	■				
7.	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■		
8.	Meja Hijau													■	■

Sumber: Rencana Penulis (2021)

3.3 Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel atas dasar pertimbangan tertentu.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Berikut ini adalah kriteria-kriteria sampel yang digunakan di dalam penelitian ini :

- a. Responden dalam penelitian ini merupakan seluruh pejabat struktural dan para pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, baik yang saat ini menduduki posisi

di sub bagian keuangan maupun yang pernah atau mempunyai riwayat jabatan atau pengalaman di bidang sub bagian keuangan. Pembatasan obyek penelitian ini hanya dibatasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah berangkat dari alasan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan adalah salah satu dari satuan kerja unit pelaksana teknis yang menerima dan mengelola anggarannya secara langsung. Selain itu, aspek kemudahan dalam menjangkau informasi yang dibutuhkan juga menjadi alasan peneliti, sehingga peneliti mengharapkan pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan mudah, efektif, efisien serta ekonomis, dan mengingat juga situasi dan kondisi pada saat ini yang tidak kondusif disebabkan oleh sedang terjadinya Pandemi Covid-19;

- b. Responden memiliki riwayat atau pengalaman masa kerja minimal satu tahun dalam periode pengelolaan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan;
- c. Responden memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi keuangan serta pencatatan dan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek (orang), yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik

dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui perantara media. Data primer ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian maupun kegiatan dan hasil pengujian.

Data primer ini berasal dari pengumpulan data dari jawaban para responden atas angket atau kuesioner yang dibagikan kepada seluruh pejabat struktural dan para pegawai yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi akuntansi atau pada bagian tata usaha sub bagian keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara penyebaran secara langsung kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang menjadi populasi dan memenuhi kriteria dari sampel penelitian.

Hasil pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu penerapan sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia, serta kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Faktor-faktor yang diteliti adalah sistem pengendalian internal (SPI), standar akuntansi pemerintahan (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variabel*) merupakan variabel yang keberadaannya tidak memiliki pengaruh dari variabel lain, tetapi keberadaan variabel ini akan memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Terdapat 4 (empat) variabel bebas (*independent variabel*) dalam penelitian ini, antara lain: sistem pengendalian internal (X1), standar akuntansi pemerintahan (X2), pemanfaatan teknologi informasi (X3), dan kualitas sumber daya manusia (X4);
2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*) merupakan variabel yang memiliki pengaruh dari variabel lain atau yang menjadi akibat karena adanya pengaruh dari variabel bebas (*independent variabel*). Variabel terikat (*dependent variabel*) dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan (Y).

b. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat diuraikan antara lain :

1. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya dalam suatu organisasi, serta memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan pendeteksian terhadap terjadinya penyelewengan, penggelapan atau fraud. Sistem Pengendalian internal pemerintah yang mengacu pada tingkat pengendalian internal yang dilakukan oleh instansi telah sesuai dengan peraturan dan ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Variabel sistem pengendalian internal dalam penelitian ini diukur menggunakan 10 item pernyataan dan diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai poin 5 yang menyatakan sangat setuju.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagai dasar dan pedoman untuk membuat laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan ini berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan telah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang disertai dengan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam penelitian ini diukur menggunakan dengan menggunakan 9 item

pertanyaan dan diukur dengan skala likert, yaitu: mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai poin 5 yang menyatakan sangat setuju.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap seorang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan Teknologi Informasi didasarkan pada perilaku pegawai dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem informasi dalam menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan organisasi sangat dibutuhkan oleh seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam melakukan proses pengolahan data-data dan informasi keuangan sehingga dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan juga dengan tepat waktu. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur menggunakan 6 item pertanyaan dan diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai poin 5 yang menyatakan sangat setuju.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara efektif dan efisien dalam organisasi dengan kualifikasi pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan

organisasi. Kualitas sumber daya manusia didasarkan pada tingkat dimana pegawai memiliki kemampuan di dalam proses pengolahan data-data keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur menggunakan 9 item pertanyaan dan diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai poin 5 yang menyatakan sangat setuju.

5. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan. Kualitas laporan keuangan mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyebutkan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya. Indikator kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan diukur menggunakan 9 item pertanyaan dan diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai poin 5 yang menyatakan sangat setuju.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Sistem Pengendalian Internal (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Resiko; 3. Aktivitas Pengendalian; 4. Komunikasi dan Informasi; 5. Pemantauan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah menerapkan standar aturan etika dan perilaku pegawai; 2. Kepala Kantor sebagai pimpinan instansi telah menjadi role model bagi seluruh pegawai dalam berperilaku sesuai dengan standar aturan; 3. Melaksanakan pengendalian internal dan analisis terhadap resiko kemungkinan terjadinya pelanggaran; 4. Melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap resiko untuk mengurangi pelanggaran yang ada; 5. Adanya kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan; 6. Adanya otorisasi dari pihak berwenang atas setiap kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan; 7. Adanya penerapan terhadap pemisahan tugas pokok dan fungsi pegawai yang memadai; 8. Adanya penerapan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab; 9. Dilaksanakannya saluran komunikasi secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan para pengawas intern sehingga dapat memberikan saran dan masukan yang signifikan; 10. Pimpinan secara mendadak melakukan pemeriksaan terhadap catatan-catatan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan. 	Ordinal

<p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dengan Bukti; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Informasi yang disajikan ; 4. Komunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan telah menerapkan standar aturan etika dan perilaku pegawai; 2. Melakukan pencatatan aset kantor yang didukung dengan dokumen-dokumen lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan didukung dokumen-dokumen lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab pegawai; 5. Pengelola keuangan selalu menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disajikan dengan tepat waktu; 6. Pengelolaan keuangan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; 7. Laporan keuangan sebagai informasi keuangan selalu disajikan secara jujur dan terbuka; 8. Ketersediaan anggaran dapat memenuhi seluruh kebutuhan operasional perkantoran; 	<p>Ordinal</p>
<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Komputer; 2. Penggunaan jaringan telekomunikasi; 3. Efisiensi dan Efektivitas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola keuangan menggunakan komputer dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 2. Melakukan pengolahan data-data keuangan menggunakan software atau aplikasi keuangan yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Laporan-laporan akuntansi keuangan diproses melalui sistem informasi akuntansi yang telah terintegrasi; 	<p>Ordinal</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Semua proses akuntansi keuangan dilaksanakan dengan terkomputerisasi; 5. Ketersediaan jaringan telekomunikasi untuk mempermudah pekerjaan dan berbagi data dan informasi yang dibutuhkan; 6. Pelaksanakan pemeliharaan komputer dan jaringan telekomunikasi secara teratur dan terjadwal; 7. Pengelola keuangan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dalam pelaksanaan tugasnya agar semakin efektif dan efisien; 	
Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan; 2. Pelatihan; 3. Tanggung Jawab 4. Pengalaman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi; 2. Adanya pelatihan yang sesuai dengan fungsi pengelola keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang keuangan; 3. Pengelola keuangan memahami materi pelatihan dan menerapkannya dalam teknis pekerjaan; 4. Pengelola keuangan memahami siklus akuntansi dalam pengelolaan keuangan dengan baik; 5. Pengelola keuangan memahami tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan; 6. Pengelola keuangan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab; 7. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku; 8. Pengelola keuangan berpengalaman di bidang keuangan sehingga meminimalkan kesalahan dalam bekerja. 	Ordinal

<p>Kualitas Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan; 2. Andal; 3. Dapat dibandingkan; 4. Dapat dipahami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); 2. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masa lalu; 3. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengestimasi aktivitas-aktivitas keuangan di masa yang akan datang; 4. Laporan keuangan disajikan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; 5. Laporan keuangan yang disajikan menggambarkan dengan jujur semua transaksi-transaksi keuangan yang terjadi; 6. Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material; 7. Laporan keuangan yang disajikan telah teruji kebenarannya; 8. Informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memenuhi kebutuhan para penggunanya dan tidak berpihak terhadap kepentingan tertentu; 9. Laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya; 10. Laporan keuangan yang disajikan menghasilkan informasi yang jelas sehingga dapat dipahami oleh para pengguna informasi. 	<p>Ordinal</p>
---	--	--	----------------

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara membagikan angket (kuesioner yang berisi daftar pertanyaan) kepada subyek untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif, dan dapat dijadikan dasar untuk menganalisa. Prosedur pengumpulan data melalui angket ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu: Sistem Pengendalian Internal (SPI), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Penyebaran angket dilakukan secara langsung kepada sampel penelitian, yaitu pejabat struktural dan para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi pengelolaan keuangan atau para pegawai tata usaha sub bagian keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu teknik dalam proses penelitian yang dilakukan peneliti setelah memperoleh semua data yang diperlukan secara lengkap guna memecahkan permasalahan yang diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Regresi Linier Berganda. Peneliti juga menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data hasil pengumpulan data yang telah dilakukan.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa kuantitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisa suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Dalam penelitian ini, karena jenis data yang

digunakan adalah data kuantitatif, maka analisa kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantitatifkan data-data yang diperoleh melalui angket ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 (lima) poin. Teknik analisa data yang dilakukan untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011:32) bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dari analisis statistik deskriptif akan diperoleh nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum untuk memperoleh deskriptif variabel dan nilai rata-rata dari frekuensi serta kategori pernyataan untuk deskriptif *item* pernyataan dalam penelitian.

2. Uji Reabilitas dan Validitas

a. Uji Reabilitas

Sugiyono (2011:120) mengemukakan bahwa instrumen yang reliabel belum tentu valid dan instrumen yang valid belum tentu reliabel, sehingga reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu angket (kuesioner) yang merupakan indikator dari setiap variabel dan hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama.

Suatu angket (kuesioner) dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas dapat diukur dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

- 1) Pengukuran Ulang (*Repeated Measure*), yaitu pengukuran dilakukan dengan cara seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama tetapi dengan waktu yang berlainan, kemudian diteliti kembali apakah jawaban kuesioner tersebut tetap konsisten.
- 2) Pengukuran Sekali Saja (*One Shot*), yaitu pengukuran dilakukan hanya sekali saja dan hasil tersebut akan dibandingkan terhadap pertanyaan lain. Kemudian menggunakan SPSS sebagai fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α).

b. Uji Validitas

Uji validitas kuesioner digunakan untuk mengukur kesahihan indikator-indikator suatu objek pengukuran. Validitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan sah mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan sudah tepat. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan dalam angket (kuesioner) terhadap skor totalnya. Jika korelasi antara masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor

tersebut menunjukkan hasil yang signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa data yang diolah dalam penelitian sah (tidak ada penyimpangan), dengan melakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2011) terdapat 2 (dua) cara yang digunakan untuk melakukan pengujian, yaitu:

- 1) Analisa grafik, yaitu: dengan melihat *Normal Probability Plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang diobservasi dengan distribusi kumulatif yang mendekati Normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data berdistribusi Normal, maka garis yang menggambarkan data observasi akan mengikuti garis diagonalnya.
- 2) Analisis statistik, yaitu uji statistik *non-parametrik Kolmogorov- Uji Smirnov (K-S)*, yang dilakukan dengan membandingkan distribusi kumulatif relatif hasil data yang

diobservasi dengan distribusi kumulatif relatif teoretisnya.

Data dapat dikatakan berdistribusi Normal apabila koefisien Asymp. Sign. (2-tailed) > dari $\alpha = 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent variabel). Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear di antara variabel bebas (independent variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independent variabel).

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi dapat dilihat melalui nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*), dimana jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan nilai tolerance > 0,10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas, tetapi jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) > 10 dan nilai tolerance < 0,10 dapat disimpulkan bahwa terdapat gangguan multikolinearitas di dalam penelitian. (Ghozali, 2011)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians (*variance*) dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians (*variance*) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak ada terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian Heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel bebas (*independent variabel*) terhadap nilai absolut dari residual. Apabila nilai koefisien korelasi antara variabel bebas (*independent variabel*) dengan nilai absolut dari residual tidak signifikan, maka kesimpulannya tidak terdapat Heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser, yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot karena dapat menimbulkan bias.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2011), analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (*independent variabel*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variabel*). Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel bebas (*independent variabel*) yang berhubungan dengan satu variabel terikat (*dependent variabel*) sehingga analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk melakukan pengujian pengaruh antara dua variabel bebas (*independent variabel*) atau lebih terhadap satu variabel terikat (*dependent variabel*). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan
a	=	Konstanta
B1,B2,B3,B4	=	Koefisien Regresi dari Variabel Bebas (Independent Variabel)
X1	=	Sistem Pengendalian Internal
X2	=	Standar Akuntansi Pemerintahan
X3	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X4	=	Kualitas Sumber Daya Manusia
e	=	Error (Variabel Pengganggu)

5. Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh simpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis secara individual (parsial) dan secara menyeluruh (simultan). Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik t dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya berada di daerah kritis (H_0 diterima), maka perhitungan tersebut signifikan, dan begitu juga sebaliknya. Adapun uraiannya dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dalam variabel bebas (independent variabel) untuk menjelaskan bersama-sama variabel terikat (dependent variabel) pada suatu model regresi yang telah dibuat dengan nilai koefisien

determinasi adalah nol dan satu. Apabila Koefisien Determinasinya (R^2) semakin besar dan mendekati ke angka 1, maka semakin baik variabel bebas (independent variabel) dalam menjelaskan variabel terikatnya (dependent variabel), begitu juga sebaliknya.

Untuk mengetahui variabel bebas (independent variabel) mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat (dependent variabel) dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel bebas (independent variabel) yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat (dependent variabel) dilihat dari koefisien korelasi parsialnya yang paling besar.

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Suatu koefisien regresi yang signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (independent variabel) secara individual dalam menerangkan variabel terikat (dependent variabel). Untuk menguji hipotesis koefisien regresi : $H_0 = 0$, kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut dengan uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Bila nilai tingkat signifikan $> 5\%$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Dapat diartikan bahwa variabel bebas (*independent variabel*) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variabel*).
- 2) Bila nilai tingkat signifikan $< 5\%$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Dapat diartikan bahwa

variabel bebas (*independent variabel*) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variabel*).

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (*independent variabel*) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent variabel*). Untuk menguji hipotesis ini digunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai tingkat dari signifikansi $> 5\%$ ($F > 0,05$) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan;
- 2) Apabila nilai tingkat dari signifikansi $< 5\%$ ($F < 0,05$) atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Setelah terbentuknya Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka di seluruh wilayah Indonesia pada tahun tersebut dibentuk kantor pendaratan yang pada mulanya disebut “On schepings Kantoor” yang kemudian tugas Kantor Pendaratan itu berkembang melaksanakan teknis operasional keimigrasian. Untuk mengatur tugas dan fungsi tersebut maka dibentuk dalam inspektorat-inspektorat di tingkat propinsi atau lebih.

Koordinasi dan operasional Kantor Imigrasi Daerah Medan (pada waktu itu) berada di bawah Kantor Inspektorat Wilayah I Sumatera Utara/Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

Awalnya Kantor Inspektorat Wilayah (*Kins-piyah*) Sumatera Utara/Aceh tersebut bernama Kantor Inspektorat Imigrasi Sumatra Utara/Aceh yang berkedudukan di Medan, dan Kantor Imigrasi Daerah Medan sebelumnya bernama Kantor Imigrasi Medan. Perubahan ini didasarkan pada surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor S.016/III/3 tanggal 12 Oktober 1966. Akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S/4/5/16 tanggal 14 Juli 1974, nama Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah diganti menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, dan Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Daerah Medan.

Pada tahun 1979 Kantor Imigrasi Daerah Medan dihapuskan dan dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di Medan. Hal ini juga tidak berjalan lama, karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.04.1981 pada tanggal 20 Januari 1981, tentang pengaktifan kembali Kantor Imigrasi Medan yang diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh, maka terhitung pada tanggal 1 Juli 1981 Kantor Imigrasi Medan diaktifkan kembali.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia dengan kemajuan teknologi canggihnya, maka Departemen Kehakiman pun tidak ketinggalan untuk meningkatkan Struktur Tata kerja Departemen Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam surat Nomor: M-04.PR.07.10 tahun 1982 pada tanggal 26 April 1982, Kantor Daerah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh dihapuskan, dan semua Kantor Wilayah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman seperti Kanwil Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan diintegrasikan dalam satu wadah yang disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan.

Berdasarkan surat Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.07.04 tahun 1983 tanggal 10 Maret 1983 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Imigrasi Medan dikategorikan sebagai Kantor Imigrasi kelas I.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang berada di dalam naungan Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara

berperan aktif dalam mendukung Divisi Keimigrasian dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada bidang keimigrasian, khususnya pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.



Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan diresmikan pada tanggal 6 Maret 1984 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara, terletak

di Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268-A Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20123, dengan luas tanah 3,498 M² dan luas bangunan 2,706 M² yang terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 untuk layanan publik, berupa pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA). Lantai 2 dipergunakan untuk bidang intelijen dan penindakan keimigrasian, bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian, serta bagian tata usaha.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP), maka pada tanggal 18 Desember 2015 telah dilaksanakan operasionalisasi Unit Layanan Paspor (ULP) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang terletak di area Bandar Udara Kualanamu Medan, dengan luas lahan 3.000 M² dan luas bangunan 600 M², terdiri dari 2 (dua) lantai, yang diserahkan dari Kantor Imigrasi Kelas I Polonia pada tanggal 29 Januari 2015.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, adalah sebagai berikut:

1. Kota Medan (Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah);
2. Kota Binjai;
3. Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Kuta Limbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namo Rambe, Kecamatan Biru Biru, Kecamatan Biru-Biru Muda Hilir, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Galang, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Pagar Merbau);
4. Kabupaten Langkat (Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Kuala, Kecamatan Binjai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Sicanggang, Kecamatan Bingei, Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kecamatan Langkat, Kecamatan Tamiang, Kecamatan Hinai);

5. Kabupaten Karo; dan
6. Kabupaten Serdang Bedagai (Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Matapao, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pengajahan).

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

a. Visi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

b. Misi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Melindungi Hak Asasi Manusia.

4.1.3 Struktur Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi), dengan bagan struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

4.1.4 Pembagian Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa Kantor Wilayah adalah instansi vertikal, berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri serta mempunyai fungsi, antara lain:

1. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia
6. Pelaksanaan urusan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional. RPJM Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden yaitu: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang **Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas** dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Adapun Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia antara lain:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;
6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 desember 2010,

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 desember 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Tabel 4.1

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

TUGAS POKOK	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
	Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga
	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Bagian Tata Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan dan pengendalian internal; 3. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan 4. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian; 2. Pelaksanaan pelayanan paspor; 3. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; 4. Pelayanan pas lintas batas; 5. Pelayanan izin tinggal; 6. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; 7. Pelayanan izin masuk kembali; 8. Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; 9. Pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan 10. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

<p>Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; 3. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; 4. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan 5. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.
<p>Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 2. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; 3. Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian; 4. Penyajian informasi produk intelijen; 5. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; 6. Penyidikan tindak pidana keimigrasian; 7. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan 8. Pelaksanaan pemulangan orang asing.
<p>Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana, pengoordinasian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan perlintasan keimigrasian; 2. Pemeriksaan dokumen keimigrasian; 3. Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan 4. Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

4.1.5 Gambaran Umum Responden Penelitian

Gambaran umum mengenai responden dalam suatu penelitian yaitu membahas berbagai hal yang berhubungan dengan pengolahan data dalam upaya pengujian hipotesis penelitian, seperti hasil penyebaran kuesioner, hasil statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan penelitiannya.

Penyebaran angket atau kuesioner dalam penelitian ini dilakukan sejak awal Agustus sampai dengan pertengahan Agustus 2021, dengan waktu kurang lebih selama 2 (dua) minggu. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran angket atau kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden di satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, yaitu sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai responden, yang terdiri dari: 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala Bagian Tata Usaha, 2 orang Kepala Subbagian, 4 orang Kepala Bidang, 10 orang Kepala Seksi, dan 227 orang staf. Berikut ini adalah rincian pengiriman dan pengembalian angket atau kuesioner yang dibagikan:

Tabel 4.2
Rincian Pengembalian Angket/Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang dibagikan	245
2.	Kuesioner yang kembali	197
3.	Kuesioner tidak kembali	48
4.	Kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan kriteria penelitian	77

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan melalui penyebaran angket atau kuesioner kepada 245 orang responden (100%) pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 197 kuesioner, jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 48 kuesioner, dan jumlah

kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan kriteria penelitian adalah sebanyak 77 kuesioner. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner tersebut, maka dapat diperoleh data tentang responden berdasarkan 77 kuesioner yang dapat diolah sesuai dengan kriteria penelitian, yakni dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan karakteristik jenis kelamin, usia, pendidikan, dan masa kerja, yang disajikan sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dibedakan menjadi 2 (dua kategori), yaitu laki-laki dan perempuan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini dari total 77 orang responden (100%) tersebut, sebagian besar mayoritas terdiri dari jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 responden (68,83%), dan yang terdiri dari jenis kelamin perempuan sebanyak 24 responden (31,17%).

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	53	68,83%
Perempuan	24	31,17%
Total	77	100%

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan usia diharapkan dalam penelitian ini dapat menggambarkan tingkat pengalaman seorang individu dalam melaksanakan dari tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan tabel yang disajikan di bawah ini, dapat dilihat dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dari 77 responden menghasilkan data, bahwa

responden berusia antara 20-30 tahun ada sebanyak 5 orang (6,50%), responden berusia antara 31-40 tahun ada sebanyak 42 orang (54,54%), responden berusia antara 41-50 tahun ada sebanyak 12 orang (15,58%), dan responden berusia di atas 50 tahun ada sebanyak 18 orang (23,38%).

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah mayoritas berusia 31-40 tahun, yaitu sebanyak 42 orang (54,54%).

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase (%)
20-30 Tahun	5	6,50%
31-40 Tahun	42	54,54%
41-50 Tahun	12	15,58%
>50 Tahun	18	23,38%
Total	77	100%

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Responden

Jenjang pendidikan dari responden diharapkan dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama yang berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Berdasarkan tabel yang disajikan di bawah ini, dapat dilihat hasil pengumpulan data yang dilakukan dari 77 responden menghasilkan data, bahwa responden yang berasal dari jenjang pendidikan SMA sebanyak 21 orang (27,27%), responden yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D3) sebanyak 6 orang (7,79%), responden yang berasal dari jenjang pendidikan S1 sebanyak 40 orang (51,95%), kemudian responden yang berasal dari jenjang pendidikan Magister (S2)

sebanyak 10 orang (12,99%).

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah mayoritas berasal dari jenjang pendidikan Sarjana (S1), yaitu ada sebanyak 40 orang (51,95%), yang berarti bahwa pola pikir dan kemampuan dari setiap individu tersebut dapat dianggap telah cukup memadai dan cakap untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMA	21	27,27 %
DIPLOMA (D3)	6	7,79 %
SARJANA (S1)	40	51,95 %
MAGISTER (S2)	10	12,99 %
Total	77	100%

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Responden

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini dari total 77 orang responden (100%) tersebut telah memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun sebanyak 1 orang responden (1,30%), masa kerja antara 1-5 tahun sebanyak 2 responden (2,60%), masa kerja antara 5-10 tahun sebanyak 6 responden (7,79%), dan masa kerja di atas 10 tahun sebanyak 68 responden (88,31%).

Berdasarkan hasil olah data tersebut, bahwa hampir seluruh responden yang ada dalam penelitian ini telah memenuhi salah satu syarat dari kriteria sampel yang akan digunakan, yaitu responden mempunyai masa kerja < 1 tahun.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
<1 Tahun	1	1,30%
1-5 Tahun	2	2,60%
5-10 Tahun	6	7,79%
>10 Tahun	68	88,31%
Total	77	100%

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

4.1.6 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011:32) bahwa Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap jawaban dari responden untuk masing-masing butir pertanyaan dalam kuesioner yang menjadi instrumen dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, disajikan tabel distribusi frekuensi dan persentase berdasarkan deskripsi variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan.

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi dan Persentase (%) berdasarkan Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan

P	STS		TS		KS		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1.1	0	0	10	12.99	3	3.9	7	9.09	57	74.03	77	100
X1.2	0	0	2	2.6	13	16.88	11	14.29	51	66.23	77	100
X1.3	0	0	3	3.9	10	12.99	8	10.39	56	72.73	77	100

X1.4	0	0	7	9.09	9	11.69	22	28.57	39	50.65	77	100
X1.5	0	0	4	5.19	9	11.69	8	10.39	56	72.73	77	100
X1.6	0	0	2	2.6	15	19.48	4	5.19	56	72.73	77	100
X1.7	0	0	9	11.69	8	10.39	10	12.99	50	64.94	77	100
X1.8	0	0	7	9.09	8	10.39	18	23.38	44	57.14	77	100
X1.9	0	0	2	2.6	14	18.18	8	10.39	53	68.83	77	100
X1.10	0	0	8	10.39	5	6.49	11	14.29	53	68.83	77	100
X2.1	0	0	15	19.48	6	7.79	1	1.3	55	71.43	77	100
X2.2	0	0	5	6.49	16	20.78	19	24.68	37	48.05	77	100
X2.3	0	0	5	6.49	19	24.68	6	7.79	47	61.04	77	100
X2.4	0	0	10	12.99	15	19.48	15	19.48	37	48.05	77	100
X2.5	0	0	5	6.49	13	16.88	12	15.58	47	61.04	77	100
X2.6	0	0	4	5.19	18	23.38	16	20.78	39	50.65	77	100
X2.7	0	0	11	14.29	9	11.69	10	12.99	47	61.04	77	100
X2.8	0	0	9	11.69	13	16.88	6	7.79	49	63.64	77	100
X2.9	0	0	12	15.58	9	11.69	6	7.79	50	64.94	77	100
X3.1	0	0	9	11.69	12	15.58	5	6.49	51	66.23	77	100
X3.2	0	0	3	3.9	13	16.88	15	19.48	46	59.74	77	100
X3.3	0	0	4	5.19	10	12.99	11	14.29	52	67.53	77	100
X3.4	0	0	7	9.09	9	11.69	8	10.39	53	68.83	77	100
X3.5	0	0	9	11.69	9	11.69	6	7.79	53	68.83	77	100
X3.6	0	0	9	11.69	8	10.39	9	11.69	51	66.23	77	100
X4.1	0	0	12	15.58	8	10.39	13	16.88	44	57.14	77	100
X4.2	0	0	4	5.19	16	20.78	8	10.39	49	63.64	77	100
X4.3	0	0	5	6.49	9	11.69	14	18.18	49	63.64	77	100
X4.4	0	0	10	12.99	8	10.39	11	14.29	48	62.34	77	100
X4.5	0	0	5	6.49	14	18.18	10	12.99	48	62.34	77	100
X4.6	0	0	4	5.19	11	14.29	12	15.58	50	64.94	77	100
X4.7	0	0	9	11.69	10	12.99	16	20.78	42	54.55	77	100
X4.8	0	0	10	12.99	10	12.99	8	10.39	49	63.64	77	100
X4.9	0	0	12	15.58	9	11.69	10	12.99	46	59.74	77	100
Y.1	0	0	8	10.39	23	29.87	20	25.97	26	33.77	77	100
Y.2	0	0	10	12.99	16	20.78	21	27.27	30	38.96	77	100
Y.3	0	0	5	6.49	15	19.48	25	32.47	32	41.56	77	100
Y.4	0	0	4	5.19	20	25.97	22	28.57	31	40.26	77	100
Y.5	0	0	7	9.09	19	24.68	21	27.27	30	38.96	77	100
Y.6	0	0	6	7.79	16	20.78	21	27.27	34	44.16	77	100
Y.7	0	0	4	5.19	22	28.57	20	25.97	31	40.26	77	100
Y.8	0	0	7	9.09	27	35.06	20	25.97	23	29.87	77	100
Y.9	0	0	8	10.39	19	24.68	21	27.27	29	37.66	77	100

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.9, distribusi frekuensi dan persentase berdasarkan deskripsi variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan,

pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Butir pertanyaan ke-1 (X1.1), terdapat 10 (12.99%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 3 (3.90%), responden menjawab S sebanyak 7 (9.09%) dan responden menjawab SS sebanyak 57 (74.03%);
- Butir pertanyaan ke-2 (X1.2), terdapat 2 (2.60%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 13 (16.88%), responden menjawab S sebanyak 11 (14.29%) dan responden menjawab SS sebanyak 51 (66.23%);
- Butir pertanyaan ke-3 (X1.3), terdapat 3 (3.90%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 10 (12.99%), responden menjawab S sebanyak 8 (10.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 56 (72.73%);
- Butir pertanyaan ke-4 (X1.4), terdapat 7 (9.09%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 22 (28.57%) dan responden menjawab SS sebanyak 39 (50.65%);
- Butir pertanyaan ke-5 (X1.5), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 8 (10.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 56 (72.73%);
- Butir pertanyaan ke-6 (X1.6), terdapat 2 (2.60%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 15 (19.48%), responden menjawab S sebanyak 4 (5.19%) dan responden menjawab SS sebanyak 56 (72.73%);
- Butir pertanyaan ke-7 (X1.7), terdapat 9 (11.69%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 8 (10.39%), responden menjawab S sebanyak 10 (12.99%) dan responden menjawab SS sebanyak 50 (64.94%);

- Butir pertanyaan ke-8 (X1.8), terdapat 7 (9.09%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 8 (10.39%), responden menjawab S sebanyak 18 (23.38%) dan responden menjawab SS sebanyak 44 (57.14%);
- Butir pertanyaan ke-9 (X1.9), terdapat 2 (2.60%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 14 (18.18%), responden menjawab S sebanyak 8 (10.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 53 (68.83%);
- Butir pertanyaan ke-10 (X1.10), terdapat 8 (10.39%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 5 (6.49%), responden menjawab S sebanyak 11 (14.29%) dan responden menjawab SS sebanyak 53 (68.83%);
- Butir pertanyaan ke-11 (X2.1), terdapat 15 (19.48%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 6 (7.79%), responden menjawab S sebanyak 1 (1.30%) dan responden menjawab SS sebanyak 55 (71.43%);
- Butir pertanyaan ke-12 (X2.2), terdapat 5 (6.49%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 16 (20.78%), responden menjawab S sebanyak 19 (24.68%) dan responden menjawab SS sebanyak 37 (48.05%);
- Butir pertanyaan ke-13 (X2.3), terdapat 5 (6.49%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 19 (24.68%), responden menjawab S sebanyak 6 (7.79%) dan responden menjawab SS sebanyak 47 (61.04%);
- Butir pertanyaan ke-14 (X2.4), terdapat 10 (12.99%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 15 (19.48%), responden menjawab S sebanyak 15 (19.48%) dan responden menjawab SS sebanyak 37 (48.05%);

- Butir pertanyaan ke-15 (X2.5), terdapat 5 (6.49%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 13 (16.88%), responden menjawab S sebanyak 12 (15.58%) dan responden menjawab SS sebanyak 47 (61.04%);
- Butir pertanyaan ke-16 (X2.6), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 18 (23.38%), responden menjawab S sebanyak 16 (20.78%) dan responden menjawab SS sebanyak 39 (50.65%);
- Butir pertanyaan ke-17 (X2.7), terdapat 11 (14.29%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 10 (12.99%) dan responden menjawab SS sebanyak 47 (61.04%);
- Butir pertanyaan ke-18 (X2.8), terdapat 9 (11.69%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 13 (16.88%), responden menjawab S sebanyak 6 (7.79%) dan responden menjawab SS sebanyak 49 (63.64%);
- Butir pertanyaan ke-19 (X2.9), terdapat 12 (15.58%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 6 (7.79%) dan responden menjawab SS sebanyak 50 (64.94%);
- Butir pertanyaan ke-20 (X3.1), terdapat 9 (11.69%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 12 (15.58%), responden menjawab S sebanyak 5 (6.49%) dan responden menjawab SS sebanyak 51 (66.23%);
- Butir pertanyaan ke-21 (X3.2), terdapat 3 (3.90%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 13 (16.88%), responden menjawab S sebanyak 15 (19.48%) dan responden menjawab SS sebanyak 46 (59.74%);
- Butir pertanyaan ke-22 (X3.3), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 10 (12.99%), responden menjawab S sebanyak 11 (14.29%) dan responden menjawab SS sebanyak 52 (67.53%);

- Butir pertanyaan ke-23 (X3.4), terdapat 7 (9.09%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 8 (10.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 53 (68.83%);
- Butir pertanyaan ke-24 (X3.5), terdapat 9 (11.69%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 6 (7.79%) dan responden menjawab SS sebanyak 53 (68.83%);
- Butir pertanyaan ke-25 (X3.6), terdapat 9 (11.69%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 8 (10.39%), responden menjawab S sebanyak 9 (11.69%) dan responden menjawab SS sebanyak 51 (66.23%);
- Butir pertanyaan ke-26 (X4.1), terdapat 12 (15.58%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 8 (10.39%), responden menjawab S sebanyak 13 (16.88%) dan responden menjawab SS sebanyak 44 (57.14%);
- Butir pertanyaan ke-27 (X4.2), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 16 (20.78%), responden menjawab S sebanyak 8 (10.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 49 (63.64%);
- Butir pertanyaan ke-28 (X4.3), terdapat 5 (6.49%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 14 (18.18%) dan responden menjawab SS sebanyak 49 (63.64%);
- Butir pertanyaan ke-29 (X4.4), terdapat 10 (12.99%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 8 (10.39%), responden menjawab S sebanyak 11 (14.29%) dan responden menjawab SS sebanyak 48 (62.34%);
- Butir pertanyaan ke-30 (X4.5), terdapat 5 (6.49%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 14 (18.18%), responden menjawab S sebanyak 10 (12.99%) dan responden menjawab SS sebanyak 48 (62.34%);

- Butir pertanyaan ke-31 (X4.6), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 11 (14.29%), responden menjawab S sebanyak 12 (15.58%) dan responden menjawab SS sebanyak 50 (64.94%);
- Butir pertanyaan ke-32 (X4.7), terdapat 9 (11.69%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 10 (12.99%), responden menjawab S sebanyak 16 (20.78%) dan responden menjawab SS sebanyak 42 (54.55%);
- Butir pertanyaan ke-33 (X4.8), terdapat 10 (12.99%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 10 (12.99%), responden menjawab S sebanyak 8 (10.39%) dan responden menjawab SS sebanyak 49 (63.64%);
- Butir pertanyaan ke-34 (X4.9), terdapat 12 (15.58%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 9 (11.69%), responden menjawab S sebanyak 10 (12.99%) dan responden menjawab SS sebanyak 46 (59.74%);
- Butir pertanyaan ke-35 (Y.1), terdapat 8 (10.39%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 23 (29.87%), responden menjawab S sebanyak 20 (25.97%) dan responden menjawab SS sebanyak 26 (33.77%);
- Butir pertanyaan ke-36 (Y.2), terdapat 10 (12.99%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 16 (20.78%), responden menjawab S sebanyak 21 (27.27%) dan responden menjawab SS sebanyak 30 (38.96%);
- Butir pertanyaan ke-37 (Y.3), terdapat 5 (6.49%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 15 (19.48%), responden menjawab S sebanyak 25 (32.47%) dan responden menjawab SS sebanyak 32 (41.56%);

- Butir pertanyaan ke-38 (Y.4), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 20 (25.97%), responden menjawab S sebanyak 22 (28.57%) dan responden menjawab SS sebanyak 31 (40.26%);
- Butir pertanyaan ke-39 (Y.5), terdapat 7 (9.09%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 19 (24.68%), responden menjawab S sebanyak 21 (27.27%) dan responden menjawab SS sebanyak 30 (38.96%);
- Butir pertanyaan ke-40 (Y.6), terdapat 6 (7.79%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 16 (20.78%), responden menjawab S sebanyak 21 (27.27%) dan responden menjawab SS sebanyak 34 (44.16%);
- Butir pertanyaan ke-41 (Y.7), terdapat 4 (5.19%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 22 (28.57%), responden menjawab S sebanyak 20 (25.97%) dan responden menjawab SS sebanyak 31 (40.26%);
- Butir pertanyaan ke-42 (Y.8), terdapat 7 (9.09%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 27 (35.06%), responden menjawab S sebanyak 20 (25.97%) dan responden menjawab SS sebanyak 23 (29.87%);
- Butir pertanyaan ke-43 (Y.9), terdapat 8 (10.39%) responden menjawab TS, responden menjawab KS sebanyak 19 (24.68%), responden menjawab S sebanyak 21 (27.27%) dan responden menjawab SS sebanyak 29 (37.66%).

4.1.7 Uji Data Penelitian

A. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk melakukan pengujian sah atau validnya setiap butir pertanyaan terhadap kuesioner yang telah dirancang. Pengujian

signifikannya dilakukan dengan membandingkan nilai R_{hitung} terhadap nilai R_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$ dimana n adalah jumlah sampel. (Ghozali, 2011)

Pengujian ini dilakukan berdasarkan analisa item yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor variabel (hasil penjumlahan seluruh skor item pertanyaan). Teknik korelasinya menggunakan *Pearson Correlation*, yaitu dihitung dengan menggunakan bantuan program komputer, yaitu menggunakan software IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

Seluruh butir-butir pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai R_{hitung} (dari setiap butir-butir pertanyaan tersebut) $> R_{tabel}$, kemudian R_{tabel} dihitung dengan menentukan nilai derajat bebas terlebih dahulu. Derajat bebas dihitung dengan rumus $df = n - 2 = 77 - 2 = 75$. Sehingga nilai R_{tabel} dengan derajat bebas $df = 75$ adalah 0,224 (Tabel R tersaji pada file lampiran). Hasil uji validitas terhadap setiap butir-butir pertanyaan dari kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Butir Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1.	Sistem Pengendalian Internal (X1)	Butir 1	0.955	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 2	0.851	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 3	0.9	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 4	0.806	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 5	0.883	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 6	0.833	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 7	0.847	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 8	0.815	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 9	0.857	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 10	0.924	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
2.	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	Butir 1	0.972	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 2	0.821	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 3	0.841	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 4	0.84	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 5	0.902	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 6	0.812	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 7	0.899	0.224	Valid ($R_{hitung} > R_{Tabel}$)

		Butir 8	0.904	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 9	0.941	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
3.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	Butir 1	0.894	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 2	0.842	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 3	0.904	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 4	0.898	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 5	0.924	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 6	0.931	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	Butir 1	0.922	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 2	0.877	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 3	0.922	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 4	0.914	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 5	0.915	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 6	0.923	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 7	0.858	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 8	0.915	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 9	0.867	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
5.	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Butir 1	0.875	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 2	0.896	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 3	0.884	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 4	0.867	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 5	0.862	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 6	0.891	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 7	0.853	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 8	0.852	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)
		Butir 9	0.906	0.224	Valid ($R_{Hitung} > R_{Tabel}$)

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas di atas, maka diperoleh nilai R_{hitung} (dari seluruh butir-butir pertanyaan) memiliki nilai lebih besar dari 0,224 (R_{tabel}), maka dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan telah valid. Sehingga seluruh butir dari instrumen-instrumen pertanyaan yang berhubungan dengan variabel sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan, seluruhnya dinyatakan valid sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tertuang pada kuesioner penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

B. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan hanya terhadap butir pertanyaan yang telah dinyatakan valid. Pengujian ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi atau kestabilan jawaban responden dari waktu ke waktu. Apabila hasil pengujiannya menunjukkan semakin setuju koefisien reliabilitasnya, maka semakin reliabel juga jawaban yang diperoleh dari responden.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengujian perhitungan terhadap besarnya nilai dari *Cronbach's Alpha* instrumen dari masing-masing variabel yang diuji. Apabila nilai dari *Cronbach's Coefficient Alpha* $> 0,60$, maka jawaban dari para responden dapat dinyatakan reliabel. Sebaliknya apabila nilai dari *Cronbach's Coefficient Alpha* $< 0,60$, maka jawaban dari para responden dapat dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Coefficient Alpha	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0.971	0,60	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	0.973	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0.968	0,60	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	0.977	0,60	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.972	0,60	Reliabel

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji reliabilitas di atas, diketahui bahwa kuesioner bersifat reliabel, karena hasil seluruh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6

(*Cronbach's Coefficient Alpha*), maka dapat diambil kesimpulan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan adalah bersifat reliabel, karena semua variabel-variabel tersebut memiliki *nilai Cronbach Alpha* $> 0,60$ sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.1.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa data yang diolah dalam penelitian sah (tidak ada penyimpangan), dengan melakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel bebas (*independent variable*) memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Ghazali (2006), model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau yang mendekati normal.

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual menggunakan uji statistik *non-parametrik Kolmogorov- Uji Smirnov (K-S)*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila koefisien *Asymp. Sign. (2-tailed)* $>$ dari $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas (p), dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila nilai probabilitas $p \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi, sebaliknya apabila nilai probabilitas $p < 0,05$, maka asumsi normalitas

tidak terpenuhi. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas menggunakan bantuan program software IBM SPSS :

Tabel 4.10
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		77
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.76972656
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.072
	Negative	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		.987
Asymp. Sig. (2-tailed)		.284

a. Test distribution is Normal.

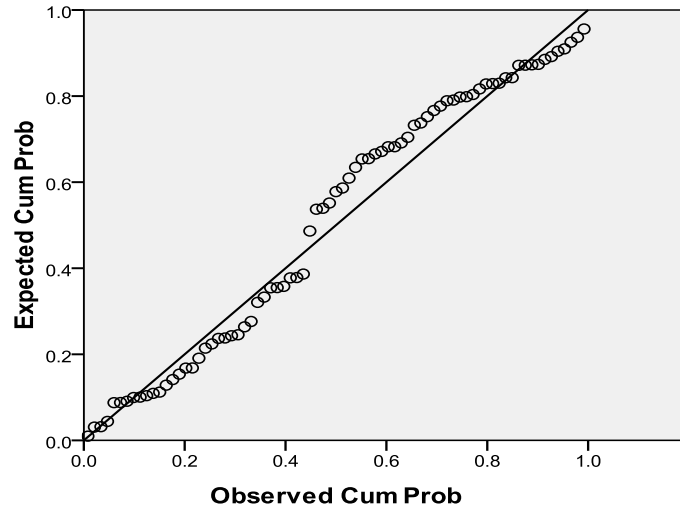
b. Calculated from data.

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.10 uji normalitas, diperoleh nilai probabilitas p atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,284. Diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$ atau $(0,284 > 0,05)$, yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

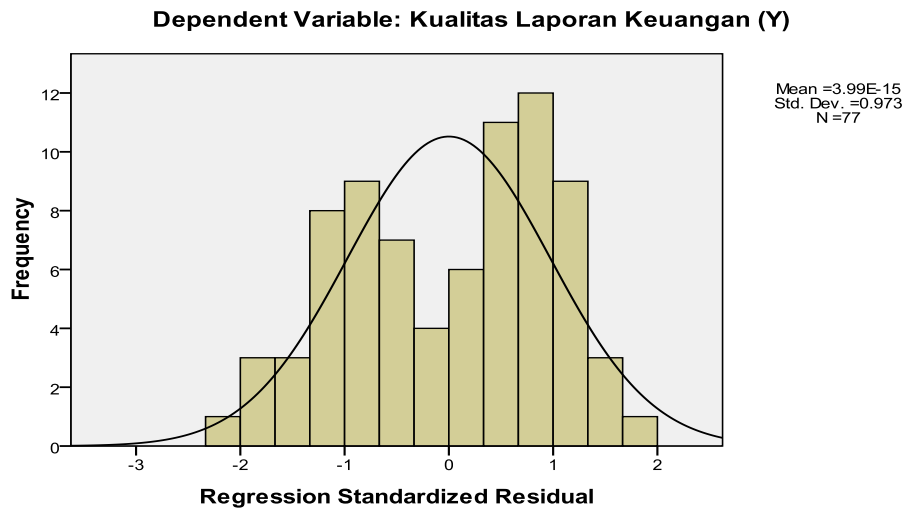
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)



Gambar 4.2
Uji Normalitas *Normal Probability Plot*

Histogram



Gambar 4.3
Uji Normalitas Histogram

Berdasarkan gambar 4.2 Uji Normalitas *Normal Probability Plot* yang merupakan pengujian normalitas dengan pendekatan *normal probability plot*, dapat dilihat terdapat titik-titik yang menyebar di sekitar garis-garis diagonal dan

penyebarannya mengikuti arah diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian pada gambar 4.3 Uji Normalitas Histogram merupakan pengujian normalitas dengan pendekatan histogram, dapat dilihat bahwa kurva memiliki bentuk kurva normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent variabel*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (*independent variabel*).

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terdapat multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* $< 0,10$ dapat disimpulkan bahwa terdapat gangguan multikolinearitas di dalam penelitian. (Ghozali, 2011)

Tabel 4.11
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Pengendalian Internal (X1)	.966	1.035
	Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	.979	1.022
	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.998	1.002
	Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	.986	1.014

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.11 uji multikolinearitas, diperoleh hasil:

- Nilai VIF dari sistem pengendalian internal adalah sebesar 1,035 dan nilai *tolerancenya* adalah sebesar 0,966;
- Nilai VIF dari standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 1,002 dan nilai *tolerancenya* adalah sebesar 0,979;
- Nilai VIF dari pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 1,002 dan nilai *tolerancenya* adalah sebesar 0,998;
- Nilai VIF dari kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 1,014 dan nilai *tolerancenya* adalah sebesar 0,986.

Jadi berdasarkan uji multikolinearitas di atas, diperoleh hasil bahwa seluruh nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians (*variance*) dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser, yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot karena dapat menimbulkan bias.

Menurut Ghozali (2013), uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas (*independent variable*) terhadap nilai absolute residual-nya terhadap variabel dependen (*dependent variable*). Kriteria yang digunakan untuk mengamati apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak, dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien signifikansi. Koefisien signifikansi harus dibandingkan dengan tingkat

signifikansi yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 0,05. Apabila koefisien signifikansi $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas), apabila koefisien signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.12
Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3.391	1.583		-2.142	.036
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.395	.204	.224	1.937	.057
Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	.186	.176	.121	1.057	.294
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.095	.180	.060	.528	.599
Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	-.178	.178	-.114	-.996	.323

a. Dependent Variable: abs_residual

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi dari sistem pengendalian internal adalah 0,057, nilai signifikansi dari standar akuntansi pemerintahan adalah 0,294, nilai signifikansi dari pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,559 dan nilai signifikansi dari kualitas sumber daya manusia adalah 0,323. Diketahui seluruh nilai signifikansi Glejser dari masing-masing variabel bebas $> 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.9 Pengujian Hipotesis

A. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (*independent variabel*) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (*dependent variabel*). Uji statistik F ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh variabel bebas (*independent variable*) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat (*dependent variable*) kualitas laporan keuangan. Untuk menguji hipotesis ini digunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 0.05.

Tabel 4.13
Hasil Uji Pengaruh Simultan dengan Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.664	4	3.916	6.262	.000 ^a
	Residual	45.028	72	.625		
	Total	60.692	76			

a. Predictors: (Constant), Kualitas Sumber Daya Manusia (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan tabel 4.14 Hasil Uji Pengaruh Simultan dengan Uji Statistik F di atas, diperoleh nilai F_{hitung} adalah sebesar 6,262 dan nilai Signifikansi (*Sig.*) adalah sebesar 0,000. Diketahui nilai F_{hitung} ($6,262$) $>$ F_{tabel} ($2,49$) dan nilai *Sig.* adalah $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Suatu koefisien regresi yang signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (independent variabel) secara individual dalam menerangkan variabel terikat (dependent variabel). Berikut ini dapat dilihat nilai koefisien regresi, serta nilai statistik t untuk pengujian pengaruh secara parsial.

Bila nilai tingkat signifikan $> 5\%$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_a diterima (koefisien regresi signifikan). Dapat diartikan bahwa variabel bebas (*independent variabel*) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variabel*). Bila nilai tingkat signifikan $< 5\%$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Dapat diartikan bahwa variabel bebas (*independent variabel*) tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variabel*).

Tabel 4.14
Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.230	.843		-.272	.786		
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.281	.109	.267	2.589	.012	.966	1.035
Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	.247	.094	.271	2.642	.010	.979	1.022
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.226	.096	.239	2.349	.022	.998	1.002
Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	.217	.095	.233	2.281	.026	.986	1.014

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan hasil uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) pada tabel 4.15 di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai koefisien regresi dari variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,281 yang berarti bernilai positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diperoleh statistik t atau t_{hitung} dari sistem pengendalian internal adalah 2,589 dan nilai Sig adalah 0,012, yaitu $<$ tingkat signifikansi 0,05, maka sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Nilai koefisien regresi dari variabel standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 0,247 yang berarti bernilai positif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diperoleh statistik t atau t_{hitung} dari standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 2,642 dan nilai Sig adalah sebesar 0,010, yakni $<$ tingkat signifikansi 0,05, maka standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar 0,226 yang berarti bernilai positif. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diperoleh statistik t atau t_{hitung} dari pemanfaatan

teknologi informasi adalah sebesar 2,349 dan nilai Sig adalah sebesar 0,022, yakni $<$ tingkat signifikansi 0,05, maka pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Nilai koefisien regresi dari variabel kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 0,217 yang berarti bernilai positif. Hal ini berarti kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Diperoleh statistik t atau t_{hitung} dari kualitas sumber daya manusia adalah sebesar 2,281 dan nilai Sig adalah sebesar 0,026, yakni $<$ tingkat signifikansi 0,05, maka kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dalam variabel bebas (*independent variabel*) untuk menjelaskan bersama-sama variabel terikat (*dependent variabel*) pada suatu model regresi yang telah dibuat dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu.

Apabila Koefisien Determinasinya (R^2) semakin besar dan mendekati ke angka 1, maka semakin baik variabel bebas (*independent variabel*) dalam menjelaskan variabel terikatnya (*dependent variabel*), begitu juga sebaliknya.

Tabel 4.15
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.508 ^a	.258	.217	.79082

a. Predictors: (Constant), Kualitas Sumber Daya Manusia (X4), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Sistem Pengendalian Internal (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Tabel 4.16 Hasil Koefisien Determinasi (R²), menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,258. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu sebesar 25,8% sisanya sebesar 100% - 25,8% = 74,2% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya.

4.1.10 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple linear regression*) adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Ghazali (2011), analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (*independent variabel*) terhadap satu variabel terikat (*dependent variabel*). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menentukan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat yang biasa disebut dengan (Y). Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel bebas (*independent variabel*) yang berhubungan dengan satu variabel terikat (*dependent*

variabel) sehingga analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Berikut ini merupakan hasil dari analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.16
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.230	.843		-.272	.786		
Sistem Pengendalian Internal (X1)	.281	.109	.267	2.589	.012	.966	1.035
Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	.247	.094	.271	2.642	.010	.979	1.022
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	.226	.096	.239	2.349	.022	.998	1.002
Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)	.217	.095	.233	2.281	.026	.986	1.014

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil olah data primer, 2021)

Berdasarkan tabel 4.13 Analisis Regresi Linier Berganda, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda yang mencerminkan hubungan antara seluruh variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{\text{Kualitas Laporan Keuangan}} = -0.230 + 0.281X_1 + 0.247X_2 + 0.226X_3 + 0.217X_4$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat digambarkan bahwa:

1. Nilai konstanta adalah sebesar -0,230. Nilai tersebut dapat diartikan apabila sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia tidak

berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependent variable*) kualitas laporan keuangan, maka nilai variabel terikat (*dependent variable*) kualitas laporan keuangan adalah sebesar -0,230.

2. Nilai koefisien regresi dari variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,281 yang berarti bernilai positif. Hal ini berarti ketika sistem pengendalian internal meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat sebesar 0.281.
3. Nilai koefisien regresi dari variabel standar akuntansi pemerintahan adalah sebesar 0,247 yang berarti bernilai positif. Hal ini berarti ketika standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat sebesar 0,247.
4. Nilai koefisien regresi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0,226 yang berarti bernilai positif. Hal ini berarti ketika pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat sebesar 0,226;
5. Nilai koefisien regresi dari variabel kualitas sumber daya manusia adalah 0,217 yang berarti bernilai positif. Hal ini berarti ketika kualitas sumber daya manusia meningkat sebesar 1 (satu) satuan, maka kualitas laporan keuangan cenderung meningkat sebesar 0,217.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini dengan menggunakan teori keagenan, dapat dilihat bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan,

pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia. Adanya hubungan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan, yang mana dalam hal ini tugas daripada prinsipal ialah memberikan wewenang (otoritas) kepada agen dalam hal mengelola manajemen organisasi. Sehingga agen yang ditunjuk oleh prinsipal akan memberikan keseluruhan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun (laporan terkait aktivitas dalam manajemen organisasi tersebut).

Dalam hal ini satuan kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, bertindak sebagai agen yang melaksanakan wewenang yang diberikan oleh prinsipal dan kemudian memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya khususnya dalam pengelolaan dana (keuangan), dengan melakukan penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan handal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada prinsipal yang memberikan wewenang kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan (agen), dalam hal ini pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertindak sebagai prinsipal dalam hal akuntabilitas secara vertikal yang memberikan wewenang sebagai otoritas yang lebih tinggi, serta memberikan pertanggungjawaban kepada pengguna informasi dalam hal ini masyarakat luas yang bertindak juga sebagai prinsipal dalam hal akuntabilitas secara horizontal. Berkaitan dengan hal itu, laporan keuangan yang berkualitas dan handal yang disajikan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai informasi oleh para pengguna informasi keuangan (prinsipal), secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap akuntabilitas serta dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Berikut ini adalah pembahasan untuk menjelaskan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem Pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui penerapan sistem pengendalian internal yang optimal, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini setuju bahwa dengan penerapan sistem pengendalian internal yang baik maka akan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan. Sistem pengendalian internal telah menjalankan fungsinya untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kualitas laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, ketaatan terhadap peraturan dan serta efektivitas dan efisiensi operasional.

Peranan seorang pemimpin instansi yang menjadi role model dalam memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan kode etik dan penerapan kode etik secara tertulis dengan didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Pengendalian dan manajemen internal yang diterapkan untuk melakukan pemisahan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab setiap individu dalam pelaksanaan tugas, yang dalam hal ini adalah seorang pegawai ASN, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta dapat difungsikan untuk memberikan informasi

dan dasar untuk mengoreksi masa lalu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini diketahui bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Saraswati (2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar pemerintah yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini setuju bahwa dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan sistem keuangan maka akan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan keuangan, agar dapat juga

digunakan oleh para pengguna informasi untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan kinerja dari suatu entitas, serta dapat menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan terpercaya kepada masyarakat. Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan secara optimal dan terstruktur akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengukur dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelaksanaan keuangan, serta kinerja dari suatu entitas.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini diketahui bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Saraswati (2019) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui pemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keakurasian, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini setuju bahwa

dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem keuangan maka akan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi di dalam melakukan pengolahan data-data proses transaksi keuangan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan telah menggunakan software atau aplikasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diproses melalui sistem informasi akuntansi yang telah terintegrasi dengan sistem yang terkomputerisasi, serta ketersediaan jaringan telekomunikasi untuk mempermudah pekerjaan dan berbagi data dan informasi yang dibutuhkan, sehingga akan dapat membantu dalam mempermudah pekerjaan, menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja dengan lebih efektif, efisien, dan akurasi dalam perhitungan, yang berpengaruh terhadap penyampaian dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan disajikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Saraswati (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang

berkualitas akan dapat memahami fungsi dan proses akuntansi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini setuju bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan sistem keuangan agar terlaksana secara efektif dan efisien maka akan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab secara efisien dan efektif, dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. Adanya pembagian tugas dan wewenang pegawai (sumber daya manusia) secara jelas juga akan mendukung dalam penyelesaian tugas dengan penuh tanggung jawab secara maksimal dan tepat waktu. Pegawai (sumber daya manusia) yang mengikuti sebuah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai mengenai fungsi pengelolaan keuangan, akan dapat meningkatkan kemampuannya dan kompetensinya agar semakin berkualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan membantu dalam memahami siklus atau alur proses akuntansi, peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dapat membantu dalam meminimalkan kesalahan dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Saraswati

(2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

4.2.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan kata lain, sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama diterapkan dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan akan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini setuju bahwa dengan menerapkan sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan sistem keuangan yang efektif dan efisien maka akan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

Berdasarkan hasil uji penelitian ini diketahui bahwa sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zubeir Rangkuti (2017) yang menyatakan bahwa kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, dukungan manajemen, sistem pengendalian internal, dan faktor eksternal secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan (secara statistik) terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dari penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang baik maka akan dapat mengontrol proses penyusunan laporan keuangan.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan, maka laporan keuangan yang disajikan akan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 SAP 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan Berbasis Sistem Akrual.
3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memadai maka akan dapat meningkatkan keakurasian, efektivitas dan efisiensi dari penyusunan dari laporan keuangan yang berkualitas.

4. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas berpengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan sehingga akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal.
5. Variabel bebas (*independent variable*) sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik, kemudian menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan dapat memanfaatkan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja keuangan yang efektif dan efisien, serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola keuangan akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan suatu instansi.

5.2. Saran

Berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperluas ruang lingkup dari populasi dan sampel untuk objek penelitiannya;
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel bebas (*independent variable*) lainnya, di luar variabel bebas yang digunakan

dalam penelitian ini yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga lebih dapat menginterpretasikan keadaan sesungguhnya dari kualitas laporan keuangan suatu instansi tersebut.

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan pengetahuan dan masukan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Elvin (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman). Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Metode Practice Rehearsal Pairs Pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biomatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi III*; Jakarta: Erlangga.
- Caraka, Rezzy Eko, Youngjo Lee, Rung Ching Chen, Toni Toharudin, Prana Ugiana Gio, Robert Kurniawan, And Bens Pardamean. "Cluster Around Latent Variable For Vulnerability Towards Natural Hazards, Non-Natural Hazards, Social Hazards In West Papua." *IEEE Access* 9 (2020): 1972-1986.
- Caraka, R.E.; Noh, M.; Chen, R.-C.; Lee, Y.; Gio, P.U.; Pardamean, B. Connecting Climate And Communicable Disease To Penta Helix Using Hierarchical Likelihood Structural Equation Modelling. *Symmetry* 2021, 13, 657. <https://doi.org/10.3390/Sym13040657>
- COSO. *Internal Control-Integrated Framework*.1992.Www.Coso.Org (Diakses 20 Maret 2021).
- Departemen Pendidikan Indonesia (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: RMBOOKS.
- Dian Utami Sutiksno Et Al 2018 *J. Phys.: Conf. Ser.* 1028 012244
- Fitrah, A. U., Nasution, N. A., Nugroho, A., Maulana, A., & Irwan, I. (2020). Financial Risk Assesment Of Post Tsunami 2004 Shrimp Production In Aceh. *JOSETA: Journal Of Socio-Economics On Tropical Agriculture*, 2(1).
- Fitrawansah. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai). Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gio, P. U., & Caraka, R. E. (2018, June 28). PEDOMAN DASAR MENGOLAH DATA DENGAN PROGRAM APLIKASI STATISTIKA STATCAL. <https://doi.org/10.31227/osf.io/796th>
- Gio, P. U., & Caraka, R. E., 2018, Pedoman Dasar Mengolah Data Dengan Program Aplikasi STATCAL, Usupress.
- Gio, P. U., & Caraka, R. E., 2021, Regresi Logistik Biner Dengan STATCAL Disertai Perbandingan Hasil Dengan SPSS, Stata, Eviews & JASP, Usupress.
- Gio, P. U., & Caraka, R. E., 2021, Visualisasi Data Dengan EAVIS, Usupress. Gio, P.U., Elly Rosmaini, 2015, Belajar Olah Data Dengan SPSS, MINITAB, R, MICROSOFT EXCEL, EIEWS, LISREL, AMOS, Dan SMARTPLS, USU Press.
- Hair Dkk., 2013, A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Sage
- Hutapea, T. (2008). Kompetensi Plus. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2009.
- Irawan, I., & Pramono, C. (2017). Determinan Faktor-Faktor Harga Obligasi Perusahaan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia.
- Kadir, A. Dan T. Ch. Triwahyuni. (2013). Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kiranayanti. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus 2016: 1290-1318.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mahfud Sholihin & Dwi Ratmono, 2013, Analisis SEM-PLS Dengan Warppls 3.0, Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). An Effect Of Empowerment Organizational Structure And Job Design Employee Effectiveness Work In The Office Directors Of PTPN II Tanjung Morawa. International Journal Of Management, 11(5).

- Rangkuti, Ahmad Zubeir. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Implementasi SIMDA Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Rosalin, F. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada BLU Di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Saraswati, Devi. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kota Semarang). Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2018). Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan. *Kajian Akuntansi*, 19(1), 09-18.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2014). Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sutarman. (2009). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwarjono. (2014). Teori Akuntansi. Ketiga. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/43017/Uu-No-17-Tahun-2003> (Diakses 13 Maret 2021).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/40446/Uu-No-1-Tahun-2004> (Diakses 13 Maret 2021).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. https://www.Bpk.Go.Id/Assets/Files/Storage/2013/12/File_Storage_1386158654.Pdf (Diakses 13 Maret 2021).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2019/225~PMK.05~2019Per.Pdf> (Diakses 13 Maret 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/49029/Pp-No-8-Tahun-2006>
(Diakses 20 Maret 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/4876> (Diakses 20 Maret 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Pemerintahan.Www.Djpk.Depkeu.Go.Id/Attach/Post-Pp-No-71-Tahun-2010-Tentang Standar Akuntansi-Pemerintahan/PP71.Pdf*.
(Diakses 20 Maret 2021).

Zuliarti, (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi. Universitas Muria Kudus.

www.menpan.go.id/Rbkunwas/Images/Pedoman/Pengawasan_Peraturan-Pemerintah-Tahun-2008-060-08.Pdf. (Diakses 20 Maret 2021).